

DIKTAT MATA KULIAH

STUDI PEMBANGUNAN



Disusun oleh:
Chabib Musthofa, S.Sos.I.
NIP. 150378238

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah
IAIN Sunan Ampel Surabaya
2007

Kata Pengantar

Puji syukur terpanjatkan kepada Dzat Allah, Penebar rahmat pada tiap hamba dan mahluk-Nya. Dendang sholawat dan salam tidak lupa terhaturkan kepada Muhammad SAW, cermin pemantul kasih-sayang Allah pada tiap umatnya.

Ungkapan syukur layak penulis sampaikan sebagai tanda telah terselesaikannya Diktat Mata Kuliah berjudul Studi Pembangunan ini. Naskah ini disusun sebagai bagian dari reaksi akademik atas kesulitan mahasiswa, khususnya jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah Surabaya untuk memiliki referensi tentang developmentalisme. Jikapun ada, kesulitan itu belumlah usai karena secara umum buku-buku dengan tema tersebut masih tergolong “mahal” bagi kantong para mahasiswa di lingkungan IAIN.

Melihat itu, kami tergerak untuk melakukan penyusunan materi-materi dasar dari mata kuliah Studi Pembangunan yang secara khusus membicarakan perjalanan teori-teori pembangunan yang dilakukan oleh beberapa negara sebagai representasi dari negara di dunia ini. Mulai dari teori Modernisasi, teori Struktural, teori Dependensi, dan beberapa teori pembangunan kontemporer yang lahir belakangan abad 20 seperti teori Sistem Dunia dan teori Artikulasi.

Sebagai sebuah reaksi, walaupun ada dalam mimbar akademis, naskah ini tidak luput dari kekurangan dan ketidaktepatan penulisan ataupun pengungkapan gagasan. Maka perbaikan akan naskah ini berupa kritik dan saran, akan mampu membawa produk reaksi tersebut ke arah format naskah yang lebih baik. Dalam rangka ini, kami menantikan sumbangan pemikiran dari para kolega dan mahasiswa yang sehari-hari berdialektika dengan kami.

Akhirnya, kami berharap naskah ini menjadi *washilah* manfaat dan perkembangan ilmu bagi kami dan siapapun yang mencermatinya. Amin.

Penulis
Chabib Musthofa, S.Sos.I.
NIP. 150378238

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Pembangunan	1
1.2 Dimensi Pembangunan	4
1.3 Problem Pembangunan	5
1.4 Beberapa Teori Pembangunan	6
Bab 2 Teori Modernisasi	8
2.1 Sejarah, Asumsi Dasar dan Tokoh Modernisasi	8
2.1.1 Sejarah Singkat	8
2.1.2 Asumsi Dasar Modernisasi	9
2.2 Modernisasi Menurut Evsey Domar dan Roy Harrod	10
2.3 Modernisasi Menurut Max Weber	13
2.4 Modernisasi Menurut David McClelland	16
2.5 Modernisasi Menurut W.W. Rostow	18
2.6 Modernisasi Menurut Bert F. Hoselitz	21
2.7 Modernisasi Menurut Alex Inkeles dan David H. Smith	23
Bab 3 Teori Struktural	25
3.1 Background, Tokoh dan Asumsi Teoritik	25
3.2 Pembangunan Menurut Raul Presbich	27
3.3 Pembangunan Menurut Paul Baran	29
3.4 Imperialisme dan Kolonialisme	31
Bab 4 Teori Dependensi	36
4.1 Sejarah dan Asumsi Dasar Teori Dependensi	36
4.2 Pembangunan Menurut Theotonio Dos Santos	38
4.3 Pembangunan Menurut Andre Gunder Frank	41
4.4 Pembangunan Menurut F.H. Cardoso	43
4.5 Kesimpulan Teoritik	43
Bab 5 Teori Pembangunan Kontemporer	44
5.1 Teori Artikulasi	44
5.2 Teori Sistem Dunia	45
Bab 6 Penutup	47
6.1 Peta Teoritik	47
6.2 Kesimpulan	49
Daftar Pustaka	50

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Pembangunan

Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Penelusuran formula ideal dan strategi perubahan masyarakat ini dapat disebut sebagai pembangunan. Beban ini secara formal diamanatkan kepada negara melalui pemerintahan yang ada didalamnya, sehingga dalam kurun masa tertentu, pemerintahan suatu negara bertugas melakukan pembangunan pada seluruh warga negara tersebut menuju kondisi yang lebih baik.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti.¹ Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

¹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 7

Di Indonesia, makna developmentalisme mengalami perkembangan dari konsep ideal tentang sebuah tatanan kesejahteraan masyarakat yang diformulasikan oleh negara-negara Barat. Format kesejahteraan ini kemudian mengalami perdebatan ketika developmentalisme sedikit banyak dipraktekkan ketika zaman Orde Baru berkuasa. Perdebatan ini terjadi karena pada dasarnya makna developmentalisme dan kesejahteraan sangat tergantung dari konteks dimana istilah tersebut digunakan dalam melihat keadaan.²

Modernization bermakna melakukan formulasi ulang atas sesuatu yang asalnya primitif atau tradisional, menuju kondisi yang lebih baik secara fisik. Pengertian ini menekankan adanya perubahan atau penambahan bentuk fisik dari kondisi asalnya.

Empowering bermakna upaya memberdayakan sesuatu untuk lebih berdaya lagi dari kondisi sebelumnya. Titik tekan istilah ini ada terletak pada penambahan kemampuan yang dimiliki oleh obyek proses *empowering*. Jika ada seorang manusia yang asalnya hanya mampu membaca dan memahami sepuluh lembar tulisan dalam satu jam, lalu melalui proses tertentu kemampuan tersebut bertambah menjadi seratus lembar tulisan dalam satu jam, maka ilustrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai akibat *empowering*.

Industrialization identik dengan istilah industrialisasi. Term ini bermakna perubahan atau peralihan orientasi mata pencaharian dari yang bersifat agraris atau

² Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002) h. 12-13

bercocok tanam menuju bentuk pekerjaan industri. Manusia tidak lagi memposisikan dirinya untuk tergantung penuh pada produk jadi alam dalam memenuhi kebutuhannya, namun lebih pada pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendapatkan kebahagiaan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki manusia.

Economic growth dapat diartikan dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika berbicara tentang pembangunan, maka tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kemampuan ekonomi dari manusia yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Muara dari *economic growth* adalah kemakmuran yang juga dapat menjadi tanda bahwa pembangunan telah berhasil dilakukan.

Term *europanization* muncul sebagai dampak konsep pembangunan yang diterapkan di Indonesia, bahwa kiblat kemajuan adalah negara-negara Eropa. Jika Indonesia ingin mencapai kemajuan atau kemakmuran yang diinginkan, maka Indonesia harus meniru negara-negara Eropa, karena disanalah letak kemajuan tersebut. Jadilah upaya imitasi gaya hidup tersebut menjadi bagian dari terminologi *europanization* di Indonesia. Istilah ini juga dekat dengan *westernization* atau kebarat-baratan.

Political change adalah perubahan politik. Artinya, perubahan kondisi politik sebuah negara akan membawa dampak pada arah pembangunan yang dilakukan di negara tersebut, sehingga sekecil apapun pengaruhnya, perubahan politik akan ikut mewarnai orientasi, langkah dan model pembangunan yang sedang berjalan di sebuah negara tertentu.

Dari beberapa penelusuran makna pembangunan secara kebahasaan tersebut, dapat ditentukan beberapa nilai dasar dari konsep pembangunan. *Pertama*, pembangunan mengandung makna proses. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Daur proses itupun dapat dimulai melalui satu titik dan berakhir pada titik lain, lalu dimulai lagi dari titik awal dimana sebelumnya telah dimulai.³ *Kedua*, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada pertambahan nilai (*value*) dan guna (*utility*) dari obyek pembangunan. Dalam hal ini, dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangunan. *Ketiga*, terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan. Ada subyek yang melakukan pembangunan, ada rangkaian langkah yang menjadi panduan, dan terdapat juga obyek atau sasaran pembangunan.

1.2. Dimensi Pembangunan

Dimensi pembangunan adalah *subject matter* yang menjadi kawasan garapan dari pembangunan. Sebagai sebuah upaya menambah nilai dan guna sesuatu menjadi lebih baik, pembangunan memiliki sekian banyak bidang garapan yang saling terkait, namun tidak dapat disatukan dalam sebuah kawasan kajian secara makro semata-

³ Meminjam istilah Thomas Kuhn dalam pemikiran ilmu-ilmu sosial yang mengibaratkan bahwa ada daur paradigma yang lebih dapat dikatakan sebagai siklus dalam khazanah teori-teori sosial. Siklus paradigma tersebut suatu saat akan berubah dan berhenti pada satu format, untuk selanjutnya memulai kembali rotasi perubahannya. Lihat George Ritzer, *Sociologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) h. 15

mata. Ada perspektif mikro yang sangat tergantung pada –meminjam istilah Antropologi—*locus spehre*-nya masih-masing.

Dimensi-dimensi inilah yang menjadi rel dan bidang garapan dari sekian banyak upaya peningkatan kemakmuran masyarakat sebuah negara yang menerapkan pembangunan. Ada *grand goal* yang dicanangkan tiap pelaku pembangunan dalam melakukan aktifitasnya, namun ada juga *spesific goal* dalam pembangunan yang berada dalam dimensi atau kawasan tertentu. Kesemuanya memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, namun keterkaitan tersebut tidak secara langsung menafikan spesifikasi orientasi masing-masing dimensi.

Pelaku pembangunan seringkali menentukan standar keberhasilan dari aktifitas yang mereka lakukan untuk mencapai *goal of development*. Standar tersebut akan dapat di-*breakdown* dari sekian banyak indikator pertambahan kemajuan dari dimensi-dimensi pembangunan yang telah dicanangkan sebagai sasaran. Keberhasilan sebuah pembangunan akan dapat dilihat dan diukur dari indikator-indikator tersebut, sehingga pembangunan memiliki kejelasan orientasi dan target yang dapat dinilai secara riil. Adapun dimensi pembangunan dapat dikategorikan dalam wilayah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumberdaya manusia, hukum, politik, sarana, dan keadilan masyarakat secara umum.

1.3. Problem Pembangunan

Musuh utama yang dihadapi oleh pembangunan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, rendahnya kesehatan yang semuanya

bermuara pada kemiskinan. Semua negara pernah atau bahkan sedang berjuang menghadapi sekian banyak problem tersebut, disamping masih banyak lagi problem turunan lagi yang bergelayut pada tiap kawasan negara tertentu.

“What does poverty happen”, adalah pertanyaan dasar ketika membicarakan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah dari pembangunan. Minimal ada dua penjelasan/pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat asal mula munculnya kemiskinan di beberapa negara, terutama di negara Dunia Ketiga.

Pendekatan pertama menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena ditentukan oleh faktor yang ada didalam sebuah negara itu sendiri. Cara berpikir seperti ini lebih banyak dikenal dengan pendekatan internal dalam menjelaskan problem kemiskinan dalam pembangunan. Kesalahan utama atas terjadinya kemiskinan adalah karena yang menyangkut kemiskinan itu sendiri dan menafikan keberpengaruhannya pihak luar yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Pendekatan ini melahirkan teori modernisasi.

Pendekatan kedua menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena faktor eksternal yang memasuki atau mempengaruhi sebuah negara. Ada upaya-upaya dari luar negara atau masyarakat tertentu yang secara sengaja menyebabkan terjadinya kemiskinan, sehingga pendekatan ini lebih dikenal dengan pendekatan eksternal. Latar belakang inilah yang kemudian memunculkan teori pembangunan struktural.

1.4. Beberapa Teori Pembangunan

Beberapa kajian tentang teori pembangunan akan dibahas secara khusus dalam diktat ini sebagai bahan studi utama. Teori-teori pembangunan tersebut secara berurutan adalah teori Modernisasi, teori Struktural, teori Dependensi, teori Liberal, teori Artikulasi, dan teori Sistem Dunia.

Walaupun kelahiran satu teori pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan teori sebelumnya, namun sekian teori tersebut akan dibahas dalam satu bagian yang terpisah. Teori Dependensi misalnya, ia lahir sebagai reaksi atas fenomena kegagalan teori modernisasi dalam menjawab problem pembangunan di beberapa negara dunia Ketiga, namun pembahasan akan teori Dependensi dipisahkan dari teori modernisasi.

BAB 2

TEORI MODERNISASI

2.1. Sejarah, Asumsi Dasar dan Tokoh Modernisasi

2.1.1. Sejarah Singkat

Tanggal 20 Januari 1949, Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman kali pertama menyitir istilah “*developmentalism*”. Untuk selanjutnya, ia mempropagandakan istilah *under-development* bagi negara-negara bekas jajahan agar mampu meredam pengaruh Komunisme-Sosialisme sebagai tawaran ideologi pembangunan.¹

Teori Modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara-negara Dunia Ketiga. Kelompok negara miskin yang ada dalam istilah Dunia Ketiga adalah negara bekas jajahan perang yang menjadi bahan rebutan pelaku Perang Dunia II. Sebagai negara yang telah mendapatkan pengalaman sekian waktu sebagai negara jajahan, kelompok Dunia Ketiga berupaya melakukan pembangunan untuk menjawab pekerjaan rumah mereka yaitu kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, rusaknya lingkungan, kebodohan, dan beberapa problem lain.

¹ Stephen Gill, Neo-Liberalism and The Shift Toward a US-Centered Transnational Hegemony, in Henk Overbeek, ed., *Restructuring Hegemony in The Global Political Economy: The Rise to Transnational Liberalism in The 1980s*, (London: Routledge, 1993) h. 248

Pasca usainya PD II, yang muncul kemudian adalah perang dingin antara negara-negara penganut Kapitalisme yang dikomandani oleh Amerika Serikat *vis avis* dengan Komunisme yang waktu itu Uni Sovyet sebagai panglimanya. Pada kondisi inilah peperangan tidak terjadi secara fisik, namun lebih bersifat ideologis antara Kapitalisme dan Sosialisme. Dua faham ini bersaing untuk mendapatkan penganut, terutama dari kalangan negara Dunia Ketiga yang sedang mencari formula jitu bagi pembangunan di negaranya masing-masing.

Ketertarikan negara-negara Asia-Afrika bekas jajahan perang kepada faham Sosialisme untuk melakukan rekayasa sosial di negaranya, menjadikan minat terhadap Sosialisme meningkat di beberapa belahan dunia. Hal ini menjadikan Amerika Serikat yang menganut Kapitalisme melalui para ilmuwanya berupaya membuat formula pembangunan baru yang dapat digunakan sebagai penawar ketertarikan terhadap ideologi Sosialisme tersebut. Gagasan pembangunan ini kemudian lebih dikenal dengan istilah Marshall Plan yang telah berhasil memajukan Eropa dengan modernisasi. Gagasan ini juga yang kemudian ditawarkan kepada negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.²

2.1.2. Asumsi Dasar Modernisasi

Secara etimologis, ada beberapa tokoh yang mengajukan pendapat tentang makna modernisasi. Everett M. Rogers dalam *“Modernization Among Peasants: The*

² Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) h. 66

Impact of Communication” menyatakan bahwa modernisasi merupakan proses dimana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah.

Cyril E. Black dalam “*Dinamics of Modernization*” berpendapat bahwa secara historis modernisasi adalah proses perkembangan lembaga-lembaga secara perlahan disesuaikan dengan perubahan fungsi secara cepat dan menimbulkan peningkatan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam hal pengetahuan manusia. Dengan pengetahuan tersebut, akan memungkinkan manusia untuk menguasai lingkungannya dan melakukan revolusi ilmiah.

Daniel Lerner dalam “*The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East*” menyatakan bahwa modernisasi merupakan suatu trend unilateral yang sekuler dalam mengarahkan cara-cara hidup dari tradisional menjadi partisipan. Marion Ievy dalam “*Modernization and the Structure of Societies*” juga menyatakan bahwa modernisasi adalah adanya penggunaan ukuran rasio sumberdaya kekuasaan, jika makin tinggi rasio tersebut, maka modernisasi akan semakin mungkin terjadi.

Dari beberapa definisi tersebut, modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan dan waktu tertentu dan terukur.

Sebagaimana sebuah teori, Modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan. *Pertama*, kemiskinan dipandang oleh Modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah

negara.³ Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seorang warga yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan layak melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana orang itu berada, bukan negara lain.

Kedua, muara segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang terhadap kemiskinan. Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang kali pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara. Cara paling tepat menurut Modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan modal untuk melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi di sebuah negara, maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil.⁴

Banyak tokoh dari disiplin berbeda-beda yang berada dalam kelompok teori modernisasi. Diantaranya adalah Evsey Domar, Roy Harrod, David McClelland, WW. Rostow, Max Weber, Bert F. Hoselitz, Alex Inkeles dan David H. Smith. Kesemuanya memberikan teorinya masing-masing dan menjadi dasar dari bangunan teori modernisasi.

³ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2000) h. 18

⁴ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002) h. 44-47

2.2. Modernisasi Menurut Evsey Domar dan Roy Harrod

Dua tokoh ini memiliki pendapat dasar tentang pembangunan, khususnya pada dimensi ekonomi. Investasi menjadi persoalan penting bagi Domar dan Harrod dalam tiap proses pembangunan di sebuah negara. Dapat juga dikatakan bahwa mereka menekankan bahwa investasi adalah standar keberhasilan dalam proses pembangunan.⁵

Formulasi asumsi tersebut secara kausalitas dapat dijelaskan ketika ada peningkatan investasi dalam sebuah negara, maka akan muncul sekian banyak variasi jenis usaha baru yang akan membuka penerimaan tenaga kerja baru. Jika semakin banyak angkatan kerja yang telah bekerja dan memiliki penghasilan, maka angka pengangguran akan berkurang dan diganti dengan angkatan kerja produktif. Jika produktifitas masyarakat meningkat, maka kemampuan memenuhi kebutuhan hidup juga meningkat. Jika kebutuhan telah terpenuhi, maka itulah yang disebut dengan kemakmuran yang menjadi tujuan modernisasi.

Logika ini juga berlaku terbalik. Jika investasi rendah, maka kemunculan industri atau usaha juga rendah. Jika tidak banyak jenis usaha dalam sebuah negara, maka penyerapan angkatan kerja juga rendah yang mengakibatkan pengangguran bertambah. Jika pengangguran bertambah, maka potensi masyarakat memenuhi kebutuhan —khususnya pengangguran tersebut—secara otomatis semakin tertutup.

⁵ Magnus Blomstrom & Bjorn Hettne, *Development Theory in Transition, The Dependency Debat and Beyond: Third World Responses*, (London: Zed Books, 1984) h. 12-13

Akhirnya, jika pemenuhan kebutuhan tidak tercapai, maka itu disebut dengan ketidakmakmuran. Dalam arti lain, pembangunan telah gagal.

Tidak hanya investasi yang menjadi fokus penentuan indikator dari dua tokoh modernisasi ini, namun *saving* atau kemampuan masyarakat untuk menabung dari penghasilan yang mereka dapatkan, merupakan standar kedua dari keberhasilan pembangunan. Logika ekonominya, jika seseorang telah mampu menabung, maka kebutuhan hidupnya telah terpenuhi, dan itu menandakan sebuah kemakmuran. Namun jika seseorang tidak mampu menabung, maka ia masih belum mencapai kemakmuran, atau bahkan kurang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang demikian tersebut adalah tanda kegagalan pembangunan.

Formulasi dua indikator keberhasilan pembangunan tersebut dapat diilustrasikan bahwa jika tabungan dan investasi dalam sebuah negara meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga secara otomatis meningkat. Sebaliknya, jika tabungan dan investasi sebuah negara menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dan itu menandakan bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan telah gagal.

Domar dan Harrod menawarkan dua strategi untuk menciptakan tingginya suhu investasi dan tabungan dari warga sebuah negara. *Pertama*, dengan melakukan penanaman modal domestik, dan *kedua*, menarik investasi dan hutang luar negeri.

Penanaman modal domestik berarti menggalakkan potensi-potensi modal lokal untuk membentuk usaha ekonomi baru dengan kemampuan lokal dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah dapat membantu dengan

memberikan bantuan atau pinjaman pada usaha-usaha ekonomi domestik dengan harapan bahwa usaha ekonomi tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Semakin banyak usaha ekonomi lokal yang berdiri, maka akan dapat meminimalisir pengangguran dan mewujudkan kemakmuran bagi tenaga kerja produktif yang bekerja di usaha ekonomi tersebut.

Strategi kedua adalah menarik investasi dan hutang luar negeri. Asumsi ini diperuntukkan bagi negara yang masih belum memiliki modal dalam melakukan aktifitas ekonomi yang ada didalam negara tersebut. Negara semacam ini dapat menarik modal asing untuk melakukan investasi usaha baru didalam negara tersebut. Upaya ini diharapkan akan membuka peluang kerja dan menekan angka pengangguran, sehingga masyarakat dapat memenuhi *basic needs*-nya. Dalam konteks yang lebih ekstrim, sebuah negara dianjurkan oleh Domar-Harrod untuk melakukan hutang luar negeri dalam membiayai investasi ekonomi domestik di negara tersebut.

2.3. Modernisasi Menurut Max Weber

Tesis utama Weber tentang pembangunan bermuara pada ide yang ditulisnya dalam sebuah buku berjudul "*The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*" setelah melakukan penelitian terhadap korelasi etika Protestan terhadap kemajuan Kapitalisme di Eropa, khususnya di Jerman dan Inggris. Sebelumnya, sebagai seorang sosiolog agama, ia mendasarkan bahwa mobilitas masyarakat dalam membangun dirinya, tidak sepenuhnya ditentukan oleh motivasi ekonomi semata,

namun lebih dipengaruhi oleh nilai budaya yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat tersebut.⁶

Weber menemukan bahwa pemeluk Protestan di Eropa memiliki dan mengamalkan nilai-nilai pemikiran Calvinis dan Asketis dalam kehidupan ekonominya sehari-hari. Dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bersifat manusiawi, namun yang menentukan tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang lebih ditentukan oleh sikap dan perilaku orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku seseorang dalam aktifitas ekonominya, di Eropa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat, yaitu etika Protestan. Sehingga Weber melihat bahwa agama Protestan berjasa besar atas perkembangan Kapitalisme di Eropa.

Kaum Protestan yang diteliti Weber memberikan deskripsi bahwa dunia dan segala isinya dipahami sebagai pemberian Tuhan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kerja dianggap sebagai sebuah panggilan Tuhan yang bersifat suci dalam rangka memanfaatkan dunia tersebut. Jika penganut Protestan tidak mau bekerja, maka sebenarnya penganut tersebut telah menolak Tuhan dalam kehidupannya. Adalah menjadi dosa tersendiri ketika menolak Tuhan. Ketakutan akan dosa yang berdampingan dengan kepentingan produktifitas inilah yang menjadi nilai dasar dari etika Protestan. Dengan kata lain, ketaatan transendental penganut Protestan dapat diukur dari gairah kerja yang dimilikinya.

⁶ Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, (New York: Charles Scribner's Sons, 1958)

Logika semacam ini membawa pada asumsi bahwa ada korelasi positif antara ketaatan dan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh penganut Protestan. Semakin banyak kepemilikan harta pemeluk Protestan, maka makin tebal keimanannya pada Tuhan. Sebaliknya, jika semakin sedikit kepemilikan harta pemeluk Protestan, maka dapat ditegaskan bahwa keimanannya pada Tuhan juga rendah.

Yang juga menarik, Weber menemukan bahwa Kapitalisme di Eropa dapat berkembang karena nilai-nilai asketis dalam doktrin Protestan. Peringatan untuk tidak cepat berpuas diri akan keberhasilan yang telah didapatkan adalah asumsi dasar dari pemikiran ini. Hipotesis utama Kapitalisme adalah penguasaan modal sebesar-besarnya. Artinya, tiap subyek manusia yang menganut ideologi pembangunan ini diasumsikan akan terus berupaya untuk menguasai modal agar dapat menentukan penguasaan ekonomi olehnya. Ia akan berusaha untuk terus mendapatkan modal yang dapat menguasai kebutuhan orang banyak. Salah satu upaya menguasai modal adalah dengan menekankan hidup sederhana dan memperbanyak *saving* sumber dana material agar nantinya akan dapat dijadikan modal usaha baru atau memperbesar usaha ekonomi yang telah dilakukan.

Kaum Calvinis melawan tradisi pemikiran sebelumnya yang menyatakan bahwa bekerja keras untuk menumpuk harta dan menikmatinya dengan berfoya-foya adalah sebuah dosa besar dimata Tuhan. Calvinis berpendapat bahwa orang harus bekerja keras untuk mendapatkan harta secara maksimal, namun penguasaan harta tersebut diharuskan dapat membawa keselamatan bagi dirinya dan orang di sekelilingnya. Adapun keselamatan tersebut, dalam pandangan teologi *calvinisme*

adalah bagian dari pancaran kasih Tuhan yang diberikan kepada hambanya. Wujud kasih tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan derma atau amal kepada orang sekeliling yang membutuhkan dengan harta, fasilitas hidup, atau tenaga yang dimiliki dengan proses perolehan yang maksimal.

Dalam pandangan tentang relasi antara Kapitalisme dan agama Protestan ini, Weber menekankan bahwa Kapitalisme yang telah matang atau dewasa bukan didasarkan pada keinginan untuk mengumpulkan keuntungan semata-mata, namun lebih merupakan aktifitas rasional yang menekankan akan *order* atau keteraturan, disiplin dan hirarkhi dalam sebuah organisasi. Kapitalisme yang telah dewasa tidak lagi hanya berbicara tentang penguasaan modal untuk mencapai kekayaan saja, namun lebih menitik-beratkan pada dasar rasionalitas dalam tiap aktifitas dan selalu berorientasi pada pencapaian keteraturan, kedisiplinan, dan berjalannya fungsi dalam hirarkhi organisasi.

Kapitalisme yang telah mencapai taraf dewasa tidak mementingkan harta dan kekayaan dalam mencapai kebahagiaan, karena tidak selamanya kebahagiaan dapat ditentukan secara material dari kekayaan yang dimiliki. Ada kebahagiaan batin yang tidak dapat dibeli secara materiil oleh kekayaan yang dimiliki seseorang. Pemenuhan kebutuhan atau kebahagiaan batin inilah yang kemudian menjadi karakter utama dalam kondisi kapitalisme yang sudah dewasa.

Hal ini dalam konteks spirit Protestan sangat wajar karena dalam Etika Protestan, pengumpulan dan penumpukan harta sebanyak-banyaknya bukanlah suatu larangan, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana keselamatan mampu

didapatkan dengan pengumpulan kekayaan tersebut. Artinya, orientasi akhir dari besar dan banyaknya kekayaan adalah untuk kebahagiaan batin dari pemiliknya, bukan kekayaan itu sendiri.

Pada kasus yang lebih khusus, orientasi penganut Protestan Calvinis dalam bekerja keras bukan meraih kesuksesan tanpa pamrih. Artinya, kekayaan material yang didapatkan sebagai hasil dari usaha tersebut bukanlah tujuan utama, namun hanya sebagai konsekwensi logis semata karena sudah bekerja secara maksimal. Yang menjadi orientasi dasar dalam bekerja keras dalam kelompok penganut Protestan Calvinis adalah upaya untuk mengatasi kecemasan. Cemas, gundah dan takut jika tetap berpangku tangan, maka sebenarnya mereka telah melanggar perintah Tuhan dan tidak ada kebahagiaan dalam batin karena telah melanggar perintah tersebut.

Kekayaan material yang didapatkan diyakini oleh kelompok ini bukan karena kerja keras yang telah mereka lakukan, namun semata-mata hanya sebagai hasil sampingan yang tidak disengaja atas kerja tersebut. Hasil akhirnya adalah keberhasilan untuk melaksanakan perintah Tuhan dan keberhasilan mereduksi atau menghilangkan kegelisahan batin yang terjadi pada diri mereka sendiri. Jadi bukan kekayaan yang menjadi orientasi utama ketika bekerja keras dalam pandangan kelompok Protestan Calvinis, namun kebahagiaan batinlah yang menjadi orientasi utama, karena kekayaan ini hanya hasil sampingan atas kerja, sedangkan tujuan awalnya adalah kebahagiaan batin.

2.4. Modernisasi Menurut David McClelland

Proposisi dasar dari McClelland sebagai seorang psikolog berpendapat bahwa segala bentuk perubahan yang terjadi dalam modernisasi atau pembangunan sebuah negara bukan ditentukan oleh lembaga/institusi, ideologi, atau konflik sosial yang sedang terjadi, namun banyak ditentukan oleh motivasi pencapaian prestasi tinggi yang dimiliki oleh tiap individu di negara tersebut.⁷ McClelland melihat adanya dominasi faktor psikis internal manusia sangat menentukan dalam keberhasilan modernisasi. Dimensi psikis inilah yang akan mewarnai segala perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga jika menginginkan perubahan positif, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memformat psikis manusianya terlebih dahulu secara positif agar memiliki kehendak positif.

Pemikiran McClelland ini berlanjut dengan pengajuan konsep *need for achievement* (n-Ach) atau keinginan mencapai prestasi tinggi. Jika di suatu negara, banyak warga negaranya yang memiliki *need for achievement* ini, maka akan dapat dipastikan bahwa negara tersebut akan mengalami peningkatan ekonomi secara drastis. Sebaliknya, jika sedikit orang yang memiliki dorongan berprestasi di suatu negara, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut akan mengalami kemerosotan ekonomi.

Need for achievement bukanlah anugerah dari Tuhan yang didapatkan sejak lahir, namun lebih seperti virus yang dapat diciptakan dan dibentuk dalam diri

⁷ David C. McClelland, *The Achievement Motive in Economic Growth* dalam Finkel & Gable, ed, 1971 h. 83-100

manusia. Dengan banyaknya warga negara yang memiliki *n-ach*, kemungkinan besar akan ada perubahan orientasi hidup menuju lebih baik secara ekonomis dalam masyarakat tersebut. Orientasi inilah yang kemudian memberikan pengaruh pada wajah pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Orang yang memiliki *n-ach*, ia akan memiliki dua karakter utama. *Pertama*, ia akan memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan taraf hidup yang dialaminya saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Ia tidak mudah puas dengan kepemilikan materi yang telah didapatkannya dengan sekian banyak aktifitas ekonomi yang dilakukannya, namun lebih memiliki pandangan jauh akan kebutuhan hidup kedepan yang memerlukan persiapan lebih matang lagi. *Kedua*, orang itu akan melakukan perubahan cara pencapaian tujuan dengan langkah-langkah yang lebih baik. Orang yang memiliki *n-ach* tinggi, kerap kali akan melakukan evaluasi atas apa yang telah dilakukannya, sehingga ia akan mengetahui kelebihan dan kekurangan langkah atau cara yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi inilah yang kemudian membawanya pada keinginan untuk lebih efisien dan efektif dalam melakukan sesuatu pada masa depan, sehingga pencapaian target kehidupan menjadi lebih terjamin.

McClelland menjadikan prestasi masing-masing manusia sebagai indikator utama dari modernisasi. Jika ada sekian banyak prestasi bermutu tinggi dari warga sebuah negara, maka pembangunan dapat dikatakan berhasil. Namun jika semakin rendah prestasi yang diraih warga suatu negara, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan telah gagal. Pencapaian prestasi ini ditentukan oleh *need for achievement* yang dimiliki oleh tiap orang di negara tersebut.

Cara McClelland melihat kebutuhan prestasi dari penduduk sebuah negara dapat dengan dua cara, yaitu metode proyeksi dan melihat metode pembimbingan anak dalam keluarga.

Dengan menggunakan proyeksi, satu komunitas dalam sebuah negara dapat ditemukan dan diamati bentuk nyanyian rakyatnya, buku-buku komiknya, puisi, drama, cerita-cerita anak, *foklor*, atau bacaan-bacaan rakyat, dan beberapa tradisi lokalnya. Selanjutnya dilakukan pengukuran atas derajat kebutuhan berprestasi dari masing-masing jenis literatur tersebut. Dengan hasil pengukuran tersebut akan dapat diketahui bagaimana derajat *n-ach* dari kelompok tersebut.

Alasan utama McClelland menjadikan dongeng dan cerita rakyat sebagai media yang dapat menunjukkan tingkat prestasi dari sebuah kelompok manusia karena cerita rakyat sebenarnya adalah merupakan refleksi dari pola pikir dari masyarakat sebuah negara tertentu. Jika pola pikir yang termanifestasikan dalam cerita-cerita tersebut banyak berisi dengan pesimisme, bersifat aprioristik, dan bahkan membawa pesan-pesan fatalistik, maka orientasi pola pikir masyarakat tersebut cenderung berlawanan dengan optimisme dan tidak dinamis menatap dunianya sendiri. Yang terjadi selanjutnya adalah keengganan untuk mendapatkan prestasi dalam aktifitasnya sehari-hari, karena pada dasarnya prestasi adalah kondisi positif diluar kebiasaan dalam diri dan aktifitas manusia.

Cara kedua adalah dengan mengukur dan mendeteksi proses pembimbingan anak yang dilakukan dalam masing-masing keluarga. Dalam hal penumbuhan kebutuhan akan prestasi, McClelland menyarankan agar orang tua menentukan

standar motivasi yang tinggi pada anak-anaknya. Selain itu, orang tua dapat menciptakan hubungan hangat dengan anak dengan menerapkan konsep reward and punishment dalam upaya menciptakan dorongan berprestasi. MacClelland juga tidak menyepakai cara-cara komunikasi yang otoriter dari orang tua kepada anak dalam komunikasi sehari-hari di rumah, terutama dalam usaha menciptakan kebutuhan prestasi terhadap anak. MacClelland lebih sepakat dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan prestasi itu melalui proses yang dialogis dan lebih manusiawi antara orang tua dan anak-anaknya.

Dalam hal ini, David McClelland menyimpulkan bahwa:

- 1) Bukan para politisi dan penasehat pembangunan yang dapat membawa kemajuan dalam pembangunan, namun yang dapat membawa kemajuan adalah kalangan wiraswastawan.
- 2) Apa yang ingin dicapai oleh para wiraswastawan adalah keinginan kuat untuk mencapai prestasi gemilang yang dikerjakannya melalui penampilan kerja yang baik dengan selalu berusaha untuk menemukan cara-cara baru untuk memperbaiki kualitas kerjanya. Inilah yang disebut dengan kebutuhan berprestasi.
- 3) Yang membuat pekerjaan berhasil yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut.
- 4) Orang yang memiliki *n-ach* tinggi, hasil baik bukanlah tujuan utama, namun kepuasan batinlah yang menjadi tujuan utama. Hasil baik

hanyalah akibat lain dari upaya yang dilakukan untuk mencapai kepuasan batin tersebut.

- 5) *N-ach* adalah semacam virus yang dapat ditularkan, bukan diwariskan sejak lahir secara turun temurun.

2.5. Modernisasi Menurut WW. Rostow

Secara klasik, tiap negara dapat melakukan upaya secara mandiri untuk menjawab dan menyelesaikan problem keterbelakangan yang menghimpitnya. Peluang untuk melakukan itu sangat terbuka, sama dengan peluang yang dimiliki dan telah dilakukan oleh negara-negara maju lainnya dalam melakukan pembangunan di negaranya masing-masing.

Negara-negara yang masih berada dalam jurang keterbelakangan dan kemiskinan, masyarakatnya melakukan kegiatan ekonomi secara agraris dengan kultur dan tanah serta kebun yang mereka miliki. Sedangkan negara maju adalah mereka yang ekonominya didasarkan pada kehidupan industri yang telah dilakukan sebelumnya sebagai pengganti ekonomi agraris di negara maju tersebut. Jadi, negara terbelakang identik dengan sawah dan kebun atau pertanian, sedangkan negara maju identik dengan pabrik dan segala jenis industrinya.

Pendapat klasik ini kemudian terfokus pada anggapan bahwa keterbelakangan adalah hambatan utama yang menyebabkan negara-negara non-industri (agraris) gagal melakukan industrialisasi yang pernah dilakukan oleh negara-negara industri pada masa sebelumnya pada abad XVIII dan XIX. Kerangka inilah yang kemudian

menjadi dasar pemikiran dari WW. Rostow dengan teori lima tahapan pembangunannya.

Sebagai seorang ekonom positivistik, WW Rostow memiliki tiga asumsi dasar yang tertuang dalam bukunya *The Stages of Economic Growth: a Non-Communist Manifesto*. Pertama, Rostow berpendapat bahwa pembangunan adalah sebuah proses linier yang memerlukan perencanaan matang dalam tiap segi pembangunannya, bukan proses gradual yang *zig-zag* tanpa arah tertentu. *Kedua*, pembangunan juga berarti kemampuan ekonomi, maka untuk mencapai kemandirian ekonomi, sebuah negara harus melalui lima tahapan pembangunan. *Ketiga*, jika dalam modernisasi, sebuah negara tidak mencapai tahapan-tahapan tersebut secara linier, maka pembangunan yang dilakukannya telah gagal. Artinya, kegagalan pembangunan adalah kegagalan melewati lima tahapan pembangunan tersebut.⁸

Pembangunan dipahami sebagai proses linier artinya bahwa pembangunan adalah sebuah tahapan yang harus ditempuh secara berurutan dari awal sampai akhir, bukan merupakan tahapan yang dapat ditempuh dengan cara melompat-lompat. Ibarat angka, maka tahapan adalah perjalanan dari angka satu, menuju dua, menuju tiga, menuju empat, sampai seterusnya. Pembangunan bukanlah proses yang berjalan dari angka satu, menuju tiga, menuju enam, kembali ke angka dua, lalu menuju empat, karena langkah semacam ini bukanlah langkah yang linier.

⁸ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002) h. 55-57

Konsentrasi utama sebuah negara dalam melakukan pembangunan adalah peningkatan kemampuan ekonomi warga negaranya, karena menurut Rostow, inti pembangunan adalah ekonomi. Bagaimanapun bagus pertumbuhan fisik berupa bangunan, institusi, budaya dan politik sebuah negara, tanpa diimbangi dengan peningkatan atau pertumbuhan ekonomi yang baik, maka pembangunan tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Jadi ukuran keberhasilan pembangunan menurut Rostow adalah tingginya tingkat kemampuan ekonomi sebuah negara. Dengan keberhasilan menumbuhkan ekonomi, maka negara tersebut akan dapat mengembangkan sekian banyak aspek kehidupan lain seperti politik, budaya, pendidikan, bidang sosial, keamanan, dan lain sebagainya.

Manifestasi pembangunan sebagai sebuah tahapan dan upaya yang linier, Rostow mengajukan gagasan tentang lima tahapan pembangunan ekonomi sebagai berikut⁹ :

2.5.1. Masyarakat Tradisional

Kondisi ekonomi masyarakat tradisional adalah kondisi pertama dalam lima tahapan pembangunan ekonomi Rostow. Kondisi ini memiliki beberapa karakter utama yang berbeda dengan karakter kondisi tahapan lain. Yang paling penting pada tahapan ini adalah adanya ketidakmampuan untuk menguasai pengetahuan dan alam. Selain itu, ada faktor budaya atau tradisi yang menghambat kemajuan karena masyarakat tradisional sangat tergantung

⁹ W.W. Rostow, *The Stages of Economics Growth: A Non-Communist Manifesto*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1966) h. 4-11

dengan mitos dan cerita yang diwariskan secara turun temurun tanpa tahu kebenaran ilmiahnya.

Sistem produksi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional sangat ditentukan oleh orientasi untuk hidup hari ini saja tanpa ada upaya lebih jauh untuk mempersiapkan kehidupan akan datang, sehingga produktifitasnya lebih terbatas.

Adapun karakter masyarakat tradisional tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum menguasai pengetahuan
- b. Berpegang pada tradisi/kepercayaan
- c. Tunduk pada alam
- d. Statis
- e. Produksi terbatas
- f. Konsumsi hanya untuk dirinya sendiri
- g. Dari generasi pertama ke generasi kedua, sama kondisinya
- h. Ikatan sosial lebih kuat
- i. *Proto industrial society*

2.5.2. Masyarakat Pra Lepas Landas

Masyarakat dalam tahapan ini memiliki beberapa pengalaman perubahan-perubahan besar dalam kehidupan ekonominya sebagai peletak dasar bagi perubahan selanjutnya. Gerakan perubahan atau pembaharuan berkaitan dengan kehidupan ekonomi yang berlangsung di sebuah negara. Gerakan

ekonomi tersebut dilakukan oleh tiga komponen yang saling bekerjasama antara satu dan yang lainnya, sehingga muncul sektor-sektor produktif di negara tersebut. Tiga komponen tersebut adalah individu, swasta dan negara, dinamakan tiga komponen ini bergerak untuk melakukan investasi atau penanaman modal bagi bangkitnya ekonomi dalam negeri tersebut.

Karakter utama dari tahapan ini adalah:

- a. Adanya investasi sektor-sektor produktif
- b. Investasi dilakukan oleh individu, swasta dan negara
- c. Membangun sumberdaya manusia

2.5.3. Masyarakat Lepas Landas

Pada masyarakat lepas landas ini, kemajuan tidak hanya dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk angka semata, namun juga dilihat secara kualitatif dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh tiap orang di negara tersebut. Bukan hanya kondisi fisik rumah atau tempat tinggal yang dapat diukur dan diklaim sebagai sebuah kemajuan, namun juga dapat dilihat dari aspek non-material dan fisik yang tampak yaitu bahagia, aman dan sejahtera.

Munculnya jenis industri baru menandakan bahwa pada kondisi ini, sebuah negara sudah menguasai beberapa teknologi dasar dan berpeluang mengembangkannya sendiri tanpa ketergantungan dengan negara lain yang telah maju. Kemajuan teknologi tersebut tentu saja diawali dengan bangkitnya

gairah pengembangan ilmu pengetahuan oleh warga negara tersebut, sehingga teknologi dapat lebih mudah dipelajari dan dikuasai.

Dalam pandangan Rostow, diperlukan minimal 20 tahun sejak melakukan modernisasi, sebuah negara dapat mencapai kondisi masyarakat seperti ini.

Karakter utama dari kondisi tahapan ini adalah:

- a. Pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif
- b. Tabungan dan investasi meningkat 10% dari pendapatan nasional
- c. Industri berkembang pesat.
- d. Investasi berupa pembangunan industri baru.
- e. Komersialisasi industri mencapai keuntungan dan bukan sekedar untuk konsumsi
- f. Titik berat produktifitas pertanian.
- g. Tansisi masyarakat: tradisional menuju modern

2.5.4. Masyarakat Bergerak ke Arah Dewasa

Pada masa ini, sebuah negara sudah mulai menemukan ilmu pengetahuan terapan baru yang berbeda dengan ilmu pengetahuan sebelumnya. Kreatifitas manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan untuk menjawab tantangan alam dan lingkungannya semata. Bahkan ilmu pengetahuan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu manusia untuk menjawab problem individualnya saja. Namun disamping itu,

pengembangan ilmu pengetahuan juga mengarah pada kebutuhan imajinasi dan kreativitas fiktif manusia yang sebelumnya lebih banyak dilihat sebagai sesuatu yang tidak mungkin dalam pandangan mitos atau tradisi di negara tersebut.

Menurut Rostow, jika tahapan sebelumnya diperlukan waktu 20 tahun untuk mencapainya, maka pada tahapan ini diperlukan waktu 40 tahun untuk mencapainya, dengan karakter masyarakat sebagai berikut:

- a. Disebut periode konsolidasi
- b. Investasi meningkat antara 10-20% dari pendapatan nasional
- c. Penguasaan ilmu pengetahuan baru
- d. Barang-barang impor diproduksi sendiri
- e. Keseimbangan antara ekspor dan impor
- f. Produksi industri barang konsumsi dan modal

2.5.5. Masyarakat Konsumsi Massal Tinggi

Tahapan ini adalah tahapan terakhir yang diusulkan oleh Rostow dalam proposisi ilmiahnya. Pada tahapan ini kompetisi yang dilakukan tiap orang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer dalam hidupnya, namun lebih digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak begitu diperlukan.

Ini terjadi karena kebutuhan dasar yang menjadi kepentingan utama tiap manusia telah dapat dipenuhi secara maksimal dan bahkan berlebihan tanpa kesulitan apapun. Bersamaan dengan telah terpenuhinya kebutuhan dasar

sebagai manusia secara berlebihan, dan juga ditopang dengan kondisi kemampuan ekonomi dan fasilitas hidup yang sangat memadai, maka yang dikejar oleh manusia pada masa ini adalah sesuatu yang tidak begitu penting lagi bagi kelangsungan hidupnya secara manusiawi, namun lebih pada pemenuhan kesenangan semata-mata. Dalam meraih kesenangan, bukan kebutuhan inilah terjadi kompetisi antar masing-masing manusia dalam tahapan terakhir dari pembangunan ini.

Karakter dari fase ini adalah sebagai berikut:

- a. Surplus ekonomi dialokasikan untuk *social welfare* (kesejahteraan sosial) dan *social income*
- b. Pembangunan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan (*continuity*)
- c. Masalah sosial muncul berupa persaingan kebutuhan yang tidak diperlukan
- d. Status dan simbol merupakan bagian dari hidup

2.6. Modernisasi Menurut Bert F. Hoselitz

Hoselitz berpendapat bahwa pembangunan bukan hanya persoalan investasi atau penanaman modal semata, karena bagaimanapun besarnya nilai investasi tanpa didukung oleh penyiapan lembaga-lembaga nyata untuk peningkatan keterampilan pelaku ekonomi, maka investasi tersebut tidak akan membawa perubahan menuju

arah lebih baik. Pendapat ini ditemukan dalam bukunya berjudul *Economic Growth and Development nonEconomic Factors in Economic Development*.¹⁰

Ada dua hal yang diperlukan dalam modernisasi, *pertama*, pasokan modal besar dengan investasi dan penyediaan dana perbankan, *kedua*, pasokan tenaga ahli dan terampil untuk memanfaatkan investasi tersebut. Hoselitz tidak menjamin bahwa besarnya investasi atau penanaman modal di suatu negara dapat menentukan keberhasilan pembangunan. Ada faktor lain yang menentukan keberhasilan pembangunan, yaitu peran tenaga ahli dan terampil untuk menggerakkan investasi tersebut. Tanpa ada tenaga ahli yang berkompeten menjalankan roda usaha, maka usaha tersebut tidak akan mencapai laba maksimal, atau bahkan akan mengalami kerugian. Kerugian juga berarti kegagalan pembangunan.

Simbiosis mutualisma antara investasi dan tenaga kerja dengan kemampuan skill memadai membutuhkan perangkat sistem aturan yang jelas dan mekanisme kerjasama yang memadai. Aturan dan mekanisme relasional ini hanya dapat berjalan dengan baik jika ada peran pranata didalamnya, yaitu negara yang menyusun dan menjalankan aturan-aturan hubungan antara tenaga kerja ahli dan investasi di suatu negara.

Pendapat Hozelitz semacam ini akan sangat tergantung dengan berperannya fungsi dari institusi ekonomi yang diusulkannya, karena sebagaimana yang diharapkan olehnya, pranata, institusi atau lembaga-lembaga ekonomi yang

¹⁰ Bert F. Hozelitz, *Economic Growth and Development: Non-Economic Factors in Economic Development*, dalam Finkle & Gable, ed., 1971 h. 184-192

dimaksudkan adalah lembaga atau institusi yang mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi di negara Dunia Ketiga. Dalam kasus yang lebih lokalistik, institusi yang dimaksud Hozelitz seperti halnya bank dan koperasi. Bank sebagai sentral sirkulasi dan distribusi moneter, sangat menentukan roda perekonomian dan industri sebuah Negara.

Koperasi juga mejadi lembaga yang dapat menjaga proses perbaikan ekonomi jika institusi tersebut berjalan secara ideal sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dengan berjalannya roda koperasi, maka keuangan masyarakat dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri dengan modal sosial yang mereka miliki. Hal inilah yang pada saatnya akan berperan besar dalam membantu laju perekonomian sebuah Negara, khususnya Negara Dunia Ketiga.

Apalagi jika koperasi atau unit ekonomi terkecil pada lapisan sosial terbawah dalam stratifikasi sosial dapat secara kreatif menghimpun dana swadaya masyarakat untuk melakukan atau membuat satu bentuk usaha secara mandiri, dengan modal mandiri, maka hal inilah yang akan menopang laju pembangunan ekonomi Negara berkembang. Dalam konteks seperti ini, pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dan stabilisator saja atas upaya ekonomi yang telah dilakukan secara mandiri oleh penduduknya, terlebih jika Negara mampu memberikan subsidi yang tidak membunuh kemandirian masyarakatnya, maka hal tersebut akan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pranata atau institusi semacam inilah yang dimaksud oleh Bert F. Hozelitz sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Negara yang sedang berupaya melakukan pembangunan ekonominya.

2.7. Modernisasi Menurut Alex Inkeles dan David H. Smith

Dalam literatur fenomenalnya berjudul *Becoming Modern*, Alex Inkeles mengajukan tiga proposisi utama sebagai dasar teori modernisasinya. *Pertama*, pendidikan adalah usaha paling efektif dalam melakukan perubahan pada diri manusia. *Kedua*, dampak pendidikan dirasakan lebih kuat daripada usaha perubahan lainnya. *Ketiga*, pendidikan dan pengalaman kerja dapat membuat manusia menjadi lebih modern.¹¹

Pendidikan yang menjadi konsentrasi mereka berdua berorientasi pada pembentukan manusia modern yang dapat mewarnai kondisi di sekelilingnya. Kondisi modernitas tidak akan tercapai sebelum menjadikan manusia didalamnya sebagai manusia modern terlebih dahulu. Perubahan manusia menuju arah modern itulah yang relatif dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan yang baik daripada usaha-usaha lain karena dampak pendidikan lebih besar daripada usaha-usaha tersebut.

Selanjutnya, Alex Inkeles dan David H. Smith mengajukan beberapa karakter utama dari manusia modern sebagai berikut:

- 1) Terbuka terhadap pengalaman baru
- 2) Berorientasi ke masa kini dan mendatang
- 3) Kesanggupan merencanakan

¹¹ Alex Inkeles & David H. Smith, *Becoming Modern: In Individual Change in Six Developing Countries*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971) h. 303-304

2.7.4. Percaya bahwa manusia dapat menguasai dan menentukan alam, bukan sebaliknya, alam yang menguasai dan menentukan hidup manusia.

BAB 3

TEORI STRUKTURAL

3.1. Background, Tokoh dan Asumsi Teoritik

Sebagaimana pembahasan terdahulu, *what does poverty happen* adalah pertanyaan utama dalam pembangunan. Pendekatan pertama menyatakan bahwa masalah kemiskinan muncul karena faktor internal dari dalam suatu negara itu sendiri tanpa ada kaitan dengan negara lain. Jika ingin menghilangkan kemiskinan, maka negara tersebut harus berupaya secara mandiri untuk melakukan sekian tindakan perubahan untuk mengikis kemiskinan tanpa tergantung pada usaha negara lain untuk membantunya. Pendekatan ini melahirkan teori Modernisasi.

Pendekatan lainnya menilai bahwa kemiskinan yang terjadi lebih dikarenakan adanya faktor eksternal diluar negara tersebut. Bagaimanapun upaya negara, terutama negara Dunia Ketiga dalam menghilangkan kemiskinan, itu tidak akan dapat membawa banyak perubahan pada masyarakatnya karena ada determinasi ekonomi eksternal yang datang dari luar negeri atas usaha tersebut. Pendekatan ini kemudian melahirkan teori Struktural.

Asumsi utama teori ini terfokus pada peran manusia sebagai aktor utama dalam pembangunan. Teori ini berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dan gejala sosial dengan mencari faktor-faktor lingkungan material yang menyebabkan. Pertilaku sosial manusia dalam bentuk apapun, dilihat oleh teori ini tidak berdiri

sendiri namun terkait dan terpengaruhi oleh faktor eksternal diluar diri manusia itu sendiri, sehingga tidak ada yang *genuin* dalam tiap tindakan manusia.

Lingkungan material yang dapat mempengaruhi tindakan manusia tersebut adalah organisasi masyarakat, sistem imbalan dan pengupahan, perubahan teknologi, dan lingkungan fisik di sekeliling manusia. Faktor-faktor itulah yang dapat mempengaruhi tindakan manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Tokoh utama dari teori ini adalah Raul Presbich seorang ekonom-liberal dan Paul Baran, seorang pemikir Marxis yang merevisi pendapat Marx tentang cara produksi Asia. Disamping itu, teori ini banyak dipengaruhi pendapat Karl Marx dan Friedrich Engels yang berpendapat bahwa kondisi material manusia merupakan sumber kesadaran tingkah laku manusia. Kondisi material yang ada dalam sebuah masyarakat adalah sistem produksi dan distribusi sumberdaya alam yang ada. Kondisi material ini menentukan sistem sosial, sistem politik, dan sistem budaya manusia.

Lebih lanjut Marx mengajukan konsep teori *Bangunan Bawah* atau *base* dan *Bangunan Atas* atau *superstructure* dalam menjelaskan kondisi ekonomi sebuah masyarakat.¹ Bangunan bawah adalah aspek material dari kehidupan manusia, sedangkan bangunan atasnya adalah aspek non materialnya. Jika bangunan bawah berubah, maka bangunan atas juga ikut berubah. Tidak sebaliknya, jika bangunan atas berubah, maka bangunan bawah akan berubah. Dalam pandangan ini, Marx berpendapat bahwa persoalan materi lebih utama dan menentukan daripada persoalan

¹ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002) h. 109-114

ide. Hal ini didasarkan pada filsafat Materialisme yang menjadi dasar pemikiran Marx.

Kondisi material adalah sumber kesadaran tingkah laku manusia itu sendiri, yang dapat termanifestasikan dalam bidang-bidang riil dalam kehidupan sehari-hari. Uang seperti halnya vitamin dalam kehidupan manusia, tidak penting didapatkan dan digunakan untuk apa dalam kacamata moral kemanusiaan, yang jelas dengan uang, seorang manusia dapat lebih mudah meraih tujuan dan keinginannya. Uang adalah dimensi material, sedangkan halal-haramnya uang adalah dimensi non-material. Uang adalah uang yang membutuhkan perjuangan untuk mendapatkannya, adapun kemudian secara moral upaya tersebut “salah”, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh dalam asumsi Marx.

Berbeda dengan pendapat ini, sebelumnya dalam Weber teori Modernisasi mengungkapkan bahwa ada kaitan antara dimensi material dengan spiritualitas yang diyakini dalam batin manusia. Bahwa ada kaitan antara kemajuan Kapitalisme di Eropa dengan spiritualitas Protestan yang kemudian menyebabkan Kapitalisme berkembang pesat di Eropa. Marx tidak melihat bahwa kondisi batin berupa spiritualitas yang dibangun atas nama agama dapat mempengaruhi kehidupan manusia, karena justru perilaku manusia tersebut dapat ditentukan oleh keadaan material dari manusia tersebut.

Pada saatnya, kondisi material inilah yang kemudian menentukan sistem sosial, sistem politik, dan bahkan sistem budaya manusia. Sebuah kelompok membangun sistem sosial didalam kelompoknya bukan atas dasar dan orientasi

keagamaan, namun lebih karena tujuan praktis, keamanan, ketertiban, keasrian dan sebagainya. Seorang menjadi kader sebuah partai politik bukan harus untuk memperjuangkan cita-cita luhur partai tersebut, namun lebih sebagai kendaraan untuk mendapatkan kepentingan pribadinya.

3.2. Pembangunan menurut Raul Presbich

Raul Presbich adalah seorang ahli ekonom-liberal yang pernah menjadi sekretaris eksekutif di sebuah lembaga PBB bernama ECLA (*Economic Commission for Latin America*) yang didirikan pada tahun 1948 di Santiago de Chile. Pada tahun sebelumnya antara 1935 sampai 1943 Raul adalah Presiden Direktur Bank Sentral Argentina yang menyebabkan dirinya berhubungan langsung dengan dampak masa depresi besar di Argentina tahun 1930-an.² Pada tahun 1950, Raul menjadi direktur ECLA dan memusatkan perhatiannya pada pandangan mengapa negara-negara industri cenderung kaya, sedangkan negara yang berkonsentrasi pada pertanian cenderung miskin. Ditahun itu juga Raul menerbitkan sebuah buku berjudul *The Economic Development of Latin America and its Principal Problems* yang diklaim sebagai karya pertama dari teori Ketergantungan yang kemudian dikenal dengan *Manifesto ECLA*.³

² Magnus Blomstrom & Bjorn Hettne, *Development Theory in Transition, The Dependency Debat and Beyond: Third World Responses*, (London: Zed Books, 1984) h. 39

³ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2000) h. 45

Dua asumsi terpenting dari Raul Presbich adalah, *pertama*, sistem perdagangan bebas dalam skala internasional, *kedua*, hambatan industrialisasi yang lebih karena faktor eksternal dari luar negara.

Teori Pembagian Kerja Internasional dan Teori Keunggulan Komparatif menyebabkan terbentuknya dua jenis negara yaitu negara pusat dan negara pinggiran. Barang-barang industri dihasilkan oleh negara pusat, sedangkan hasil-hasil pertanian dihasilkan oleh negara pinggiran. Keduanya melakukan transaksi perdagangan yang seharusnya mencapai keuntungan, namun dalam prakteknya tidak.

Dengan melakukan ekspor barang-barang hasil pertanian ke negara pusat, maka pendapatan negara pinggiran semakin meningkat dan berakibat pada peningkatan pendapatan rakyat di negara pinggiran. Namun dengan meningkatnya pendapatan, maka kebutuhan akan barang-barang mewah dari negara industri juga mengalami peningkatan, sehingga impor barang mewah di negara pinggiran meningkat. Peningkatan nilai tukar barang-barang mewah dengan hasil pertanian, menyebabkan tidak berimbangnya neraca perdagangan dan menjadikannya defisit. Selain itu, negara industri juga sering melakukan proteksi atas hasil pertanian yang mereka hasilkan, sehingga negara pinggiran sulit mengekspor hasil pertaniannya ke negara pusat. Penemuan teknologi baru juga mendorong sintesis bahan mentah industri, sehingga negara pusat tidak perlu mengimpor bahan bakar mentah dari

negara pinggiran. Hal ini menyebabkan gerak ekonomi negara pinggiran menjadi terhenti.⁴

Atas analisisnya tersebut, Raul Presbich berpendapat bahwa negara terbelakang jika ingin mencapai kemajuan haruslah melakukan industrialisasi. Dan upaya ini dilakukan kali pertama dengan melakukan industri barang substitusi impor. Barang-barang yang telah diimpor oleh negara pinggiran dari negara pusat, harus dapat diproduksi didalam negeri sendiri, sehingga negara pinggiran tidak perlu impor barang-barang tersebut dari negara pusat. Industri substitusi impor ini harus dilindungi oleh pemerintah dengan memberikan subsidi, tanpa adanya perubahan sistem ekonomi menjadi seperti di negara sosialis. Presbich tetap mempertahankan konsep teori kebebasan pasar sebagaimana kaum Liberalis lainnya.

3.3. Pembangunan menurut Paul Baran

Perbedaan mendasar antara pendapat Paul Baran dengan Karl Marx adalah pada kondisi industrialisasi yang terjadi di negara maju dan negara terbelakang. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara Dunia Ketiga saat ini masih dalam kondisi tidur pulas dan tidak melakukan upaya untuk mencapai kemajuan, sentuhan negara maju dengan Kapitalisasinya akan membangunkan negara Dunia Ketiga dan akan mampu mencapai kemajuan yang diinginkan. Pendapat ini disangkal oleh Paul Baran bahwa sentuhan negara kapitalis memang dapat membangunkan negara pra-kapitalis, namun negara tersebut akan tetap mengalami keterbelakangan karena kapitalisasi di

⁴ Ian Roxborough, *Theories of Underdevelopment*, (London: Macmillan Press Ltd, 1979) h. 28

negara maju berbeda dengan Kapitalisasi di negara terbelakang.⁵ Penjelasan ini tertuang dalam bukunya berjudul *The Political Economy of Growth* yang diterbitkan tahun 1951.

Paul Baran berpendapat bahwa kapitalisme yang berkembang di negara maju melalui tiga prasyarat utama, yaitu:

- 1) Meningkatnya produksi diikuti dengan tercerabutnya masyarakat petani dari pedesaan.
- 2) Meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian kelompok lagi menjadi majikan dengan kekayaan melimpah;
- 3) Pengumpulan harta di tangan para pedagang dan tuan tanah.

Tiga faktor itulah yang menyebabkan kapitalisme di Eropa dapat membawa kemajauan karena terjadi investasi domestik dalam bidang industri. Di negara pinggiran mengalami kondisi berbeda dengan di negara maju. Industrialisasi yang berjalan lebih dikuasai oleh para pemodal asing dengan kekuatan dana yang dimilikinya, sehingga pertumbuhan surplus ekonomi di negara pinggiran tersebut pada dasarnya adalah keuntungan para pemodal asing yang memiliki usaha di negara pinggiran. Kondisi ini juga membawa kematian pada industri yang digerakkan dari

⁵ Anthony Brewer, *Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1980) h. 148-157

modal domestik yang memiliki nilai tukar mata uang lebih rendah daripada nilai tukar mata uang pemodal asing.

Industrialisasi di negara terbelakang juga mengundang pemodal asing yang berhasrat menginvestasikan modalnya di negara terbelakang tersebut. Investasi modal negara maju ini juga membawa tenaga-tenaga terampil dari negara tersebut untuk mengelola investasi yang telah dilakukan negara asing. Upah tenaga terampil asing lebih mahal dari upah tenaga terampil dalam negeri, sehingga pendapatan tenaga kerja asing yang ada di negara terbelakang lebih tinggi dari pendapatan tenaga kerja domestik di negara terbelakang itu sendiri.

Ancaman lain juga datang dari dalam negara terbelakang atas industrialisasi yang terjadi di negara tersebut. *Pertama*, negara tidak memiliki kemampuan untuk melakukan proteksi terhadap industri lokal ketika berhadapan dengan industri modal asing, sehingga industri lokal seperti menjadi tamu di rumah sendiri. *Kedua*, muncul gejala *kretinisme*, yaitu keengganan manusia untuk maju dan lebih suka dengan kondisi yang telah dialaminya. Sesuatu yang telah didapatkan, baik berupa keuntungan materiil maupun kesejahteraan adalah sesuatu yang perlu dilestarikan secara stabil, tanpa memerlukan perubahan untuk meningkatkannya. Pandangan inilah yang kemudian menyebabkan negara terbelakang menjadi terhambat dalam mencapai kemajuan.

3.4. Imperialisme dan Kolonialisme

Imperialisasi adalah usaha untuk melakukan penjajahan kedaulatan negara lain demi tercapainya kesejahteraan didalam negeri. Ada negara terjajah dan ada negara penjajah. Negara terjajah tidak memiliki otoritas atau kedaulatan apapun untuk menentukan hidupnya, namun lebih tergantung oleh kebijakan negara penjajah. Kolonisasi lebih bersifat ekonomi, dalam arti bahwa sebuah negara melakukan ekspansi pasarnya kepada negara lain dengan harapan ia akan mendapatkan keuntungan dari ekspansi tersebut. Bungkus ekspansi ekonomi ini dapat berupa kerjasama dagang atau bentuk lain. Kelompok Marxis adalah mereka yang mengusulkan tiga konsep terjadinya imperialisme dan kolonialisme.

Ada tiga teori yang dapat menjelaskan terjadinya Imperialisme dan Kolonialisme, yaitu yang biasa disebut dengan teori God, Gold, dan Glory.⁶

3.4.1. Teori God

Teori ini berpendapat bahwa motivasi orang-orang Eropa mengarungi samudera dan menjelajah berbagai kawasan di belahan dunia dengan tujuan untuk membaptis kelompok manusia yang masih dianggap barbar dan tidak bertuhan. Motivasi ekspansi yang dilakukan adalah Perintah Tuhan, sehingga disamping melengkapi ekspansi dengan kelompok militer untuk menjaga keselamatan, juga ada

⁶ Robin W. Winks, ed., *British Imperialism: God, Gold, Glory*, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1963) h. 3

kelompok pendeta atau agamawan yang bertugas untuk melakukan dakwah agama kepada kelompok masyarakat yang ditemukan selama masa ekspansi.

Adapun di kemudian hari, misi agama tersebut berkembang atau berubah menjadi misi politis dan ekonomi, itu adalah akibat dari motivasi agama yang sebelumnya telah menjadi dasar ekspansi. Sampai kini, masih terlihat akibat teori ini di negara-negara bekas jajahan yang mayoritas penduduknya memeluk agama yang sama dengan agama negara penjajah mereka terdahulu.

Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa agama yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan para nabi-Nya mampu memberikan jawaban atas persoalan kehidupan manusia. Agama pada dasarnya dipandang sebagai sesuatu yang yang dapat memandu kesuksesan hidup manusia pada saat di dunia dan pada saat nantinya di akhirat.

Ketika anggapan dasar ini oleh kelompok yang mengklaim dirinya lebih taat beragama dibawa melihat kepada kelompok yang dianggap “kafir” dalam kacamata agama yang diyakininya, maka terjadilah imperialisasi atau penjajahan. Dalam pandangan idealis para penjajah, imperialisasi dilakukan bukan untuk menyengsarakan dan menjerumuskan kelompok yang terjajah, namun lebih tepat disebut sebagai upaya memanusiakan kembali. Bahkan imperialisasi tersebut dapat diklaim sebagai upaya penyelamatan bangsa yang terjajah oleh penjajah dari ketidakselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Subyek kreator terpenting dalam teori ini adalah figur Tuhan yang diklaim oleh sebagian kelompok atau negara tertentu untuk menjadi pembenar dari penjajahan

yang dilakukannya. Negara-negara yang cenderung melakukan ekspansi ke bangsa lain dengan dasar idealisme misi teologis ini adalah negara atau kerajaan yang mendasarkan sistem pemerintahannya pada agama tertentu, atau biasa disebut dengan negara Theokratis.

Pada negara teokratis ini posisi agama menjadi sebuah institusi yang sama levelnya dengan negara. Seorang kepala negara, kepala pemerintahan, atau raja akan mendasarkan segala bentuk kebijakannya pada kepentingan agama negara tersebut, bukan atas pertimbangan warga negara. Ada kolaborasi kepentingan antara seorang raja dengan seorang kepala agama, dimana keduanya akan saling melakukan *simbiosis mutualisma* untuk dapat meraih dan menjaga kepentingannya masing-masing. Raja akan membantu kepala agamawan meraih kepentingannya, sebaliknya kepala agamawan juga akan membantu raja untuk mendapatkan kepentingannya, walaupun harus mengatas-namakan Tuhan.

3.4.2. Teori Gold

Asumsi utama teori ini adalah dorongan manusia atau negara untuk melakukan ekspansi adalah karena motivasi ekonomi dan perolehan kekayaan. Kekayaan identik dengan penguasaan emas, sehingga teori ini disebut dengan sebutan teori *gold* yang berarti emas. Tokoh utama teori ini adalah John A. Hobson yang menulis sebuah karya berjudul *Imperialism: A Study*.

Kata kunci sebab imperialisme dalam teori ini adalah keserakahan manusia akan kekayaan yang dimilikinya. Ketika muncul pemikiran bahwa kekayaan yang

telah dimiliki harus diperbesar dan diperbanyak lagi, maka inilah dasar kemunculan dari teori ini.

Ada dua motivasi utama yang menyebabkan sebuah negara melakukan imperilasisasi dan penjajahan, *pertama*, adalah untuk menemukan menemukan daerah pasar baru, *kedua*, menemukan daerah untuk melakukan investasi baru. Negara yang telah memiliki barang-barang hasil industri melakukan ekspansi ke daerah atau negara lain untuk melakukan pemasaran barang yang dihasilkan dari industrinya. Orientasi asalnya adalah untuk melakukan ekspansi pasar. Jadi tidak harus mendirikan toko yang dekat dengan pabrik tempat barang itu diproduksi. Contoh dari hal ini dapat dilihat dari perusahaan Mc Donald dari Amerika Serikat yang memasuki pasar warung makan di Indonesia. Makanan tersebut adalah produk Amerika, namun biasa dinikmati oleh kalangan *the have* di Indonesia karena membawa citra *bonafide* dan modern bagi penikmatnya.

Dalam bentuk yang lain, imperialisasi yang dilakukan bertujuan untuk membuka lahan pasar baru di negara yang menjadi obyek imperialisasi. Diciptakanlah bentuk industri baru di negara terjajah oleh negara penjajah, sehingga industri tersebut dekat dengan sumber bahan baku industri dan tenaga kerja. Ketika sudah menjadi barang produksi industri, maka barang tersebut dijual kepada penduduk negara terjajah dengan otoritas penentuan harga ditangan negara penjajah. Industri baru yang dibuka oleh penjajah di negara terjajah didasarkan pada pertimbangan dekatnya industri tersebut dengan bahan baku industri dan tenaga kerja non-profesional yang dapat dipasok oleh negara terjajah dengan upah rendah,

sehingga mampu menekan biaya produksi. Biaya produksi yang rendah, dengan harga jual yang tinggi, akan dapat membawa keuntungan besar bagi pemilik industri, yaitu penjajah tersebut. Keuntungan besar inilah yang diinginkan oleh penjajah dalam teori *gold* ini.

Hobson berpendapat bahwa imperialisasi dapat dicegah dengan meningkatkan upah buruh dalam negeri. Peningkatan upah buruh dalam negeri akan berakibat pada kemampuan konsumsi buruh atas barang yang telah diproduksi didalam negeri. Negara tersebut juga tidak perlu melakukan ekspansi keluar negeri untuk melakukan perluasan pasar.

Pendapat ini kemudian dikomentasi oleh V.I. Lenin dalam bukunya yang berjudul *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism*. Menurut Lenin, imperialisme merupakan puncak tertinggi yang berhasil dicapai oleh kapitalisme. Kapitalisme menciptakan monopoli pasar oleh perusahaan besar. Upaya usaha besar untuk tetap bertahan adalah dengan melakukan imperialisasi ke negara penghasil bahan dasar industrinya, sehingga kelangsungan usaha akan tetap terjaga.

3.4.3. Teori Glory

Dorongan untuk mendapatkan kekuasaan dan kebesaran kedaulatan negara adalah asumsi utama dari teori ini. Dipandegani oleh Joseph A. Schumpeter, ia menolak pendapat yang mengatakan bahwa imperialisasi muncul sebagai akibat dari ekonomi atau kapitalisme di negara-negara maju secara ekonomi.

Dalam bukunya *Imperialism and Social Classes*, ia menekankan bahwa imperialisasi di dunia terjadi karena tiap manusia memiliki agresifitas instink primitif untuk menyerang dan menguasai orang lain. Teori ini disebut dengan *atavisme*. Instink ini sudah ada sejak munculnya manusia di muka bumi dan berupaya memenuhi kebutuhannya. Mulai zaman primitif, manusia telah berlaku agresif terhadap alam dan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai kini instink tersebut terus berkembang dan menjadikan manusia berusaha untuk saling menguasai antara satu dengan lainnya.

Atavisme ini melahirkan kehausan manusia akan kekuasaan untuk menentukan dan menguasai kehidupan orang atau kelompok lain. Semakin banyak wilayah dan kelompok manusia yang berada dalam kekuasaannya, maka semakin ia merasa berkuasa atas mereka. Dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki, maka manusia akan cenderung mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang termewah sekalipun.

Kehausan kekuasaan ini dapat muncul tidak hanya dalam diri pribadi seorang manusia, namun juga dapat muncul dengan label kelompok atau suku tertentu. Walaupun kemudian sangat ditentukan oleh seorang figur penguasa yang menjadi pimpinan kelompok penjajah, namun kebutuhan untuk menguasai orang lain ini dapat dimiliki dan digunakan oleh sebuah kelompok, suku, dan bahkan negara tertentu.

Imperialisasi atas dasar teori ini selalu bermuara pada penindasan atas bangsa atau kelompok yang terjajah oleh kelompok penjajahnya karena orientasi dasarnya adalah penguasaan kehidupan manusia di kelompok lain. Penindasan tersebut dapat

termanifestasikan dalam bentuk perbudakan atas manusia dari bangsa terjajah. Perbudakan ini tidak akan berakhir sebelum bangsa terjajah mampu membebaskan dirinya dari kungkungan negara penjajah.

Ketika negara terjajah ingin mendapatkan kemerdekaannya atas penjajahan yang telah diterimanya, maka pada dasarnya negara terjajah tersebut juga berada dalam frame teori *glory* untuk meraih maksudnya. Pengakuan akan kedaulatan kebebasan yang diperjuangkan oleh negara terjajah, adalah bagian dari kehausan untuk merdeka dan berkuasa atas diri sendiri. Ini terjadi karena pada saat terjajah, diri mereka bukanlah milik mereka sendiri, namun untuk tuan yang menjajahnya. Diri mereka hanyalah budak yang dapat diperjual-belikan, dipekerjakan tanpa digaji, diperintah tanpa dapat imbalan, diperas tenaga dan darahnya tanpa ada kompensasi yang lebih manusiawi. Manusia di negara terjajah dalam kacamata teori ini tidak ubahnya seperti hewan hak guna-pakainya berada sepenuhnya pada pemiliknya.

Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan ini juga termasuk sebagai upaya untuk mendapatkan kekuasaan, minimal kekuasaan pada diri sendiri karena selama belum merdeka dan keluar dari penjajahan, diri sendiri tidak berbeda dengan hewan yang dapat diperjual-belikan oleh penjajah. Perlakuan kepada manusia terjajah oleh penjajah seperti ini muncul karena bukanlah dorongan agama atau kekayaan yang mendasari penjajahan, namun adalah karena secara murni karena faktor kehausan untuk memiliki kekuasaan atas orang lain.

Dalam kondisi yang sangat ekstrim, perjuangan meraih kemerdekaan oleh negara terjajah ditempuh dengan biaya yang sangat mahal. Ekonomi, darah, budaya,

dan bahkan nyawa ikut menjadi bahan pengorbanan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan ini.

Tabel 3.1.
Komparasi teori God, Gold, dan Glory

Elemen Perbandingan	Teori God	Teori Gold	Teori Glory
1	2	3	4
Motif imperialisasi	Ekspansi ke negara atau bangsa lain adalah karena dorongan untuk melaksanakan perintah Tuhan	Ekspansi ke negara lain untuk mendapatkan dan menambah kekayaan	Ekspansi dilakukan untuk dapat menguasai negara, bangsa atau kelompok lain
Tema dasar	Perintah Tuhan	Kekayaan material	Kekuasaan politik
Jenis negara pelaku	Negara teokratis	Negara kapital	Negara militer
Akibat imperialisasi pada negara jajahan	Reformulasi teologi baru dari negara penjajah	Pembentukan pasar baru di negara terjajah Adanya investasi dari negara penjajah	Pengambil alihan kedaulatan negara oleh agresor Perbudakan oleh agresor terhadap kelompok terjajah

3.5. Kesimpulan Teoritik

- 1) Teori Struktural seringkali dianggap sebagai teori yang bersumber pada konsepsi Karl Marx tentang bangunan bawah (*base*) dan bangunan atas

(*superstructure*). Pendapat Marx ini tidak dapat dilepaskan dari faham filsafat Materialisme yang dianutnya.

- 2) Baik Raul Presbich maupun Paul Baran adalah tokoh yang melakukan kritik terhadap modernisasi yang berlangsung di negara Dunia Ketiga.
- 3) Perbedaan paradigma dalam menjawab *what does poverty happen*, adalah penyebab munculnya teori Modernisasi dan teori Struktural. Jika teori Moderniasi berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena faktor internal dalam negara itu sendiri, maka teori Struktural berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena faktor eksternal dari luar negara tersebut.
- 4) Lebih khusus, teori *struktural* merupakan akar utama dari teori Dependensi atau teori Ketergantungan.

BAB 4

TEORI DEPENDENSI

4.1. Sejarah dan Asumsi Dasar Teori Dependensi

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan jilid dua di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga. Jika pembangunan ingin

berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri.

Salah satu pemikir utama yang sampai saat ini masih mendapatkan tempat dalam gugusan ilmu pengetahuan terkemuka adalah Karl Marx. Ketertarikan banyak orang akan pemikiran Marx terutama dalam masalah ekonomi dan kelas sosial menyebabkan pemikirannya relatif diminati dan dilestarikan. Kelompok intelektual yang merujuk pendapatnya kepada Marx disebut dengan kaum Marxis.

Ada dua hal utama dalam masalah pembangunan yang menjadi karakter kaum Marxis Klasik. *Pertama*, negara pinggiran yang pra-kapitalis adalah kelompok negara yang tidak dinamis dengan cara produksi Asia, tidak feodal dan dinamis seperti tempat lahirnya kapitalisme, yaitu Eropa. *Kedua*, negara pinggiran akan maju ketika telah disentuh oleh negara pusat yang membawa kapitalisme ke negara pinggiran tersebut. Ibaratnya, negara pinggiran adalah seorang putri cantik yang sedang tertidur, ia akan bangun dan mengembangkan potensi kecantikannya setelah disentuh oleh pangeran tampan. Pangeran itulah yang disebut dengan negara pusat dengan ketampanan yang dimilikinya, yaitu kapitalisme. Pendapat inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi.

Bantahan teori Dependensi atas pendapat kaum Marxis Klasik ini juga ada dua hal. *Pertama*, negara pinggiran yang pra-kapitalis memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan dinamika negara kapitalis. Bila tidak mendapat sentuhan dari negara kapitalis yang telah maju, mereka akan bergerak dengan sendirinya mencapai kemajuan yang diinginkannya. *Kedua*, justru karena dominasi, sentuhan dan campur

tangan negara maju terhadap negara Dunia Ketiga, maka negara pra-kapitalis menjadi tidak pernah maju karena tergantung kepada negara maju tersebut. Ketergantungan tersebut ada dalam format “neo-kolonialisme” yang diterapkan oleh negara maju kepada negara Dunia Ketiga tanpa harus menghapuskan kedaulatan negara Dunia Ketiga.¹

Teori Dependensi kali pertama muncul di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini lebih merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh ECLA (*United Nation Economic Commission for Latin Amerika*) pada masa awal tahun 1960-an. Lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mampu menggerakkan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori Modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa.

Teori Dependensi juga lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang. Aliran neo-marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori Dependensi ini.

Tentang imperialisme, kaum Marxis Klasik melihatnya dari sudut pandang negara maju yang melakukannya sebagai bagian dari upaya manifestasi Kapitalisme Dewasa, sedangkan kalangan Neo-Marxis melihatnya dari sudut pandang negara pinggiran yang terkena akibat penjajahan.

¹ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2000) h. 62-63

Dalam dua tahapan revolusi, Marxis Klasik berpendapat bahwa revolusi borjuis harus lebih dahulu dilakukan baru kemudian revolusi proletar. Sedangkan Neo-Marxis berpendapat bahwa kalangan borjuis di negara terbelakang pada dasarnya adalah alat atau kepanjangan tangan dari imperialis di negara maju. Maka revolusi yang mereka lakukan tidak akan membawa perubahan di negara pinggiran, terlebih lagi, revolusi tersebut tidak akan mampu membebaskan kalangan proletar di negara berkembang dari eksploitasi kekuatan alat-alat produksi kelompok borjuis di negara tersebut dan kaum borjuis di negara maju.

Marxis Klasik percaya bahwa jika terjadi revolusi sosialis, maka hal itu sebaiknya dilakukan oleh kelompok proletar industri yang ada di kota-kota tempat berlangsungnya industrialisasi. Sedangkan Neo-Marxis berpendapat bahwa revolusi sosial sebenarnya kekuatan potensialnya terletak pada para petani di pedesaan dan rakyat yang ada di pinggiran perkotaan.

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank. Theotonio Dos Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang. Artinya, positif-negatif dampak

pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara berkembang.²

Dalam perkembangannya, teori Dependensi terbagi dua, yaitu Dependensi Klasik yang diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos, dan Dependensi Baru yang diwakili oleh F.H. Cardoso.

4.2. Pembangunan Menurut Theotonio Dos Santos

Ketergantungan adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara tertentu dipengaruhi oleh ekspansi dari ekonomi negara lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Dos Santos dalam mengkritisi pendapat kaum Marxis Klasik yang berpendapat bahwa kapitalisasi negara maju akan dapat membawa kemajuan pada negara-negara sedang berkembang.

Hubungan yang terjalin antara negara maju dan negara terbelakang adalah hubungan yang tidak sehat karena negara maju melakukan eksploitasi sumberdaya pada negara berkembang untuk kepentingan pembangunan di negaranya sendiri. Eksploitasi sumberdaya tersebut dilakukan melalui simpul-simpul industri yang ada di negara berkembang namun atas investasi negara maju, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh industri tersebut banyak yang ditarik ke negara maju, sedangkan beban dampak industrialisasi dilimpahkan ke negara berkembang yang menjadi tempat industrialisasi.

² Theotonio Dos Santos, "The Structure of Dependence" dalam *American Economic Review*, Vol. 60, May. h. 231.

Keterbelakangan ekonomi negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh tindakan terintegrasinya mereka ke dalam tata ekonomi kapitalisme di negara maju. Namun disebabkan karena tindakan pengawasan ketat dan monopoli modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat internasional dan nasional. Pada gilirannya hal tersebut menjadikan negara Dunia Ketiga mereproduksi keterbelakangan, kesengsaraan, dan marginalisasi sosial dalam batas wilayahnya sendiri. Semakin tergantung satu negara Dunia Ketiga dengan negara maju, maka kondisi tersebut akan semakin berpotensi membawa keterbelakangan dan kesengsaraan pada negara Dunia Ketiga.

Selanjutnya, Dos Santos mengemukakan ada tiga ketergantungan di negara Dunia Ketiga sebagai akibat dari ekspansi modal dan pasar yang dilakukan oleh negara-negara maju di kelompok negara berkembang.³ Bentuk-bentuk ketergantungan tersebut adalah sebagai berikut:

1).Ketergantungan Kolonial

Terjadi ketergantungan politik karena dominasi negara pusat terhadap negara pinggiran. Penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan negara berkembang ditentukan oleh keinginan negara pusat. Tidak ada legitimasi kedaulatan yang dimiliki oleh negara pinggiran ketika bekerjasama dengan negara pusat dalam rangka melakukan pembangunan.

³ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002) h. 129

Walaupun secara *de jure* dan *de facto*, negara berkembang tidak berada dalam naungan kekuasaan negara maju, namun negara maju dapat melakukan intervensi politik kebijakan dalam negeri negara berkembang. Kemampuan intervensi tersebut terjadi karena sangat berpengaruhnya investor negara maju dalam upaya melindungi investasinya di negara terbelakang. Investor dan birokrat negara maju mampu menentukan kebijakan dari birokrat negara berkembang, sehingga kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk melindungi kepentingan investasi luar negeri di negara Dunia Ketiga.

2). Ketergantungan Finansial-Industrial

Terjadi penguasaan kekuatan finansial negara satelit (pinggiran) oleh negara pusat walaupun secara yuridis-politis negara satelit adalah negara yang merdeka. Penguasaan finansial ini ditentukan oleh investasi modal asing yang dimiliki pemodal negara maju di negara berkembang dengan modal yang besarnya melebihi modal investor domestik, sehingga sirkulasi modal dapat ditentukan oleh orang-orang diluar negara pinggiran tersebut.

Lebih lanjut, arah industrialisasi juga ditentukan oleh pemodal asing, sehingga tenaga kerja dalam negeri tergantung dari industrialisasi tersebut. Tenaga kerja dalam negeri tidak mampu melakukan persaingan dengan tenaga ahli luar negeri yang didatangkan oleh pemilik modal luar negeri. Ketimpangan ini juga membawa ketimpangan upah yang diterima oleh pekerja domestik, sehingga upah pekerja tersebut tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tidak hanya itu, konsumsi barang-barang mewah dari masyarakat negara berkembang juga semakin meningkat seiring dengan tetapnya pendapat dan produktifitas yang dimiliki tenaga kerja lokal. Ekspansi pasar yang dilakukan negara maju memaksa penduduk negara berkembang melakukan pola konsumsi barang-barang mewah yang berbeda dengan kondisi sebelum terjadinya industrialisasi, padahal gaji atau pendapatan penduduk negara berkembang jauh berada dibawah pendapatan penduduk di negara maju. Ini membawa jenis konsumsi barang mewah yang tinggi, dengan gaji atau pendapatan yang rendah.

3). Ketergantungan Teknologis-Industrial

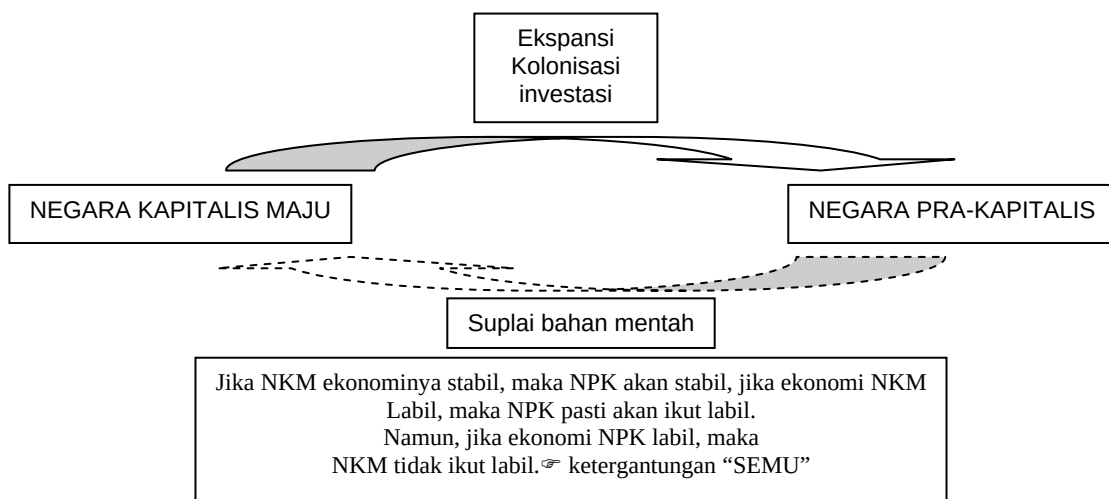
Munculnya perusahaan industri di negara satelit yang didirikan oleh pengusaha lokal, namun teknologi-industrialnya dikuasai oleh negara pusat, yang akhirnya terjadi monopoli surplus industri. Industri lokal di negara pinggiran akan mengimpor teknologi industri yang dibutuhkan untuk menjalankan roda industrialisasinya dari negara pusat, sehingga masih tetap terjadi ketergantungan dalam hal teknologi. Ketergantungan inilah yang menjadikan negara berkembang lambat dalam mencapai kemajuan.

Selain itu, Dos Santos juga melihat industrialisasi yang terjadi di negara berkembang mengalami beberapa hambatan yang sulit dihilangkan. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

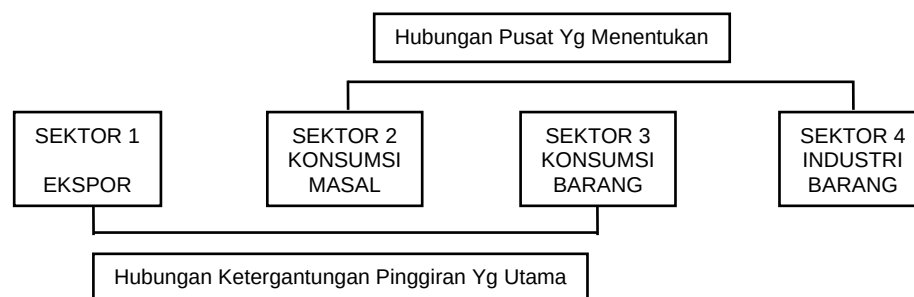
1. Negara pinggiran yg melakukan industrialisasi memerlukan valuta asing untuk mengimpor teknologi.

2. Neraca perdagangan negara satelit mengalami defisit.
3. Adanya monopoli teknologi dari negara pusat menyebabkan pembengkakan biaya sewa hak paten.

Bentuk ketergantungan negara satelit terhadap negara pusat dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.



Dalam keterangan lain, Samir Amin menggambarkan model pembangunan di negara pusat dan negara pinggiran sebagai berikut⁴:



⁴ Samir Amin, dalam Magnus Blomstrom & Bjorn Hettne, *Development Theory in Transition, The Dependency Debat and Beyond: Third World Responses*, (London: Zed Books, 1984) h: 143

4.3. Pembangunan Menurut Andre Gunder Frank

Bagi Frank, teori Modernisasi memiliki kekurangan karena ia hanya memberikan penjelasan tentang faktor internal sebagai penyebab utama dari keterbelakangan di negara Dunia Ketiga. Teori Modernisasi mengesampingkan faktor eksternal yang juga tidak kalah penting dalam memberikan andil keterbelakangan di negara Dunia Ketiga. Frank menyangkal bahwa tradisionalisme dan feodalisme yang selama ini dituding sebagai akar penyebab gagalnya pembangunan di negara Dunia Ketiga.

Teori Modernisasi juga mengesampingkan konteks sejarah lahir dan berkembangnya negara Dunia Ketiga dengan sepenuhnya menggunakan sejarah negara Eropa sebagai ukuran historis dari pembangunan. Negara Barat dan negara Dunia Ketiga memiliki sejarah lahir dan berkembang yang berbeda. Negara Barat tidak pernah merasakan kolonialisasi sebagaimana yang terjadi di negara Dunia Ketiga. Perbedaan ini membawa dampak yang berbeda pada pembangunan yang dilakukan pada dua jenis negara tersebut.

Penjajahan dalam bentuk apapun telah merubah struktur politik-ekonomi di negara Dunia Ketiga karena mereka menjadi negara yang pernah dijajah oleh negara maju. Perubahan struktur politik-ekonomi inilah yang menuntut arah alternatif pembangunan yang sama sekali berbeda dengan pembangunan yang dilakukan di negara maju yang pernah menjajah negara Dunia Ketiga. Perubahan arah pembangunan ini menurut Frank sangat penting dilakukan karena sebenarnya

keterbelakangan bukan sesuatu yang alami, melainkan seperti barang ciptaan dari panjangnya sejarah kolonial di negara-negara Dunia Ketiga.

Secara agak radikal, Frank yang pernah bekerja di *Economic Commission in Latin America* menyebutkan bahwa dalam bentuk apapun juga, kapitalisme telah menyebabkan keterbelakangan di negara Dunia Ketiga, terutama secara politis. Dibawah pengaruh pendapat Presbich, Frank secara tegas menyatakan bahwa keterbelakangan di negara berkembang adalah karena dampak pembangunan yang terjadi di negara maju.

Salah satu bukti dari pendapat ini adalah dengan melihat pembentukan kota atau negara satelit oleh negara maju di kawasan Dunia Ketiga. Kota atau negara satelit ini pada masa kolonial berfungsi sebagai wilayah yang memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi dari negara satelit ke negara maju. Kota-kota ini dipimpin atau diawasi oleh petugas yang memiliki otoritas penuh dari negara maju, sehingga mampu melakukan determinasi kebijakan yang sangat luas kepada birokrat di negara Dunia Ketiga.

Pada teori Frank, ada tiga komponen utama dalam pembangunan, tiga komponen tersebut adalah:

- 1). Modal asing.
- 2). Pemerintah lokal di negara satelit.
- 3). Kaum borjuis di negara satelit.⁵

⁵ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta, Grammedia Pustaka Utama, 2000) h. 67.

Pembangunan di negara satelit hanya terjadi di kalangan tiga komponen utama ini, tanpa menyentuh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Selanjutnya Frank mengungkapkan karakter perkembangan kapitalisme di negara satelit sebagai berikut:

- 1) Adanya ketergantungan kehidupan ekonomi di negara satelit.
- 2) Adanya kerjasama antara modal asing dengan kelas borjuis di negara satelit, yaitu para pejabat, tuan tanah dan pedagang.
- 3) Adanya ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok miskin di negara satelit.

Konsep *trickle down effect* atau tetesan air kebawah tidak berjalan di negara satelit karena sirkulasi kemampuan modal hanya berputas diantara golongan elit semata, tanpa menyentuh kelas proletar yang membutuhkan perubahan ekonomi ke arah yang lebih maju. Oleh karena itulah, maka Frank berpendapat bahwa keterbelakangan hanya akan dapat dihilangkan dengan melakukan Revolusi Langsung yang melahirkan sistem Sosialis, bukan Revolusi Tahapan seperti yang diusulkan oleh kaum Marxis Klasik. Hal ini dapat diketahui dari pendapat yang ditulisnya di buku selanjutnya berjudul *Latin America, Reform or Revolution*.

Pendapat Frank lebih radikal dari pendapat Dos Santos dalam memandang ketergantungan negara satelit atas negara pusat. Dos Santos masih melihat “sisi positif” dari ketergantungan negara satelit kepada negara pusat karena dapat membawa kemajuan ekonomi di negara satelit. Artinya ketergantungan tersebut tidak hanya membawa dampak negatif pada negara satelit, namun juga berpotensi positif

berupa kemajuan ekonomi. Lain dengan Dos Santos, Frank menyikapi kapitalisasi negara pusat kepada negara pinggiran adalah sebuah bentuk imperialisasi ekonomi yang secara pasti membawa dampak negatif pada negara pinggiran atau negara satelit.

Tabel 4.1
Komparasi teori Modernisasi dengan teori Dependensi Klasik

Elemen Perbandingan		Teori Modernisasi	Teori Dependensi
1		2	3
Persamaan	Fokus perhatian (keprihatinan)	Kemiskinan dan keterbelakangan negara Dunia Ketiga	Idem
	Struktur teori	Tradisionalitas dan modernitas	Negara sentral dan negara pinggiran/satelit
	Metode	Abstrak dalam perumusan model	
Perbedaan	Warisan teoritis	Teori Evolusi dan Fungsionalisme	Reaksi atas kegagalan ECLA di Amerika Latin dan reaksi ilmiah Marxis Klasik
	Sebab keterbelakangan	Faktor internal	Faktor eksternal
	Hubungan internasional	Saling menguntungkan	Merugikan negara Dunia Ketiga
	Masa depan negara Dunia Ketiga	Optimis menjadi maju	Pesimis karena semakin terbelakang
	Kebijakan pembangunan	Mendekatkan keterkaitan dengan negara maju	Mengurai keterkaitan dengan negara pusat = revolusi sosialis

4.4. Pembangunan Menurut F.H. Cardoso

Teori Dependensi Klasik memakai istilah ketergantungan digunakan untuk dasar teoritik yang selalu dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk dan pola keterbelakangan di negara Dunia Ketiga akibat sentuhan Kapitalisme oleh negara maju. Namun pada Dependensi Baru, istilah ketergantungan lebih dipakai sebagai sebuah metode untuk menganalisis keterbelakangan riil yang sedang terjadi di negara Dunia Ketiga. Posisi ini disebut dengan *metode historis struktural*.

Berbeda dengan Dependensi Klasik yang lebih banyak menuduh faktor eksternal sebagai penyebab keterbelakangan di negara Dunia Ketiga, Dependensi Baru disamping membenarkan pendapat tersebut, juga memperhatikan faktor internal yang dapat mempertahankan keterbelakangan di negara Dunia Ketiga. Dependensi Klasik lebih melihat aspek ekonomis dari ketergantungan negara Dunia Ketiga terhadap negara maju, namun Dependensi Baru lebih melihat aspek sosial-politik dari ketergantungan tersebut.

Tidak sebagaimana Frank dan Dos Santos yang memberikan ilustrasi bahwa ketergantungan struktural yang dialami negara Dunia Ketiga terhadap negara maju tidak akan pernah berakhir tanpa ada pemutusan hubungan antara keduanya, Dependensi Baru masih melihat adanya kemungkinan berakhirnya ketergantungan tersebut.

Negara Dunia Ketiga dalam pandangan Cardoso masih memiliki kemungkinan untuk melakukan pembangunan walaupun dalam keadaan tergantung

dengan negara maju. Kemungkinan untuk melakukan pembangunan ini merupakan peluang yang dapat membawa negara Dunia Ketiga melakukan perbaikan dari struktur sosial-politik dan ekonominya walaupun masih berada dalam naungan bayang-bayang negara maju. Dalam pengertian lain, arah ketergantungan dan pembangunan akan berjalan sejajar dalam porosnya masing-masing yang paralel.

Dalam kondisi seperti ini, masih ada sisi positif dari dominasi ekonomi yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara Dunia Ketiga dalam hal perubahan struktur ekonomi dan fisik di negara Dunia Ketiga. Disadari dan diakui atau tidak, perkembangan pendidikan, keahlian tenaga kerja dan munculnya industri yang mampu menyerap angkatan kerja di negara Dunia Ketiga adalah bagian dari investasi dan industrialisasi yang dibantu oleh kalangan investor negara maju. Tanpa sentuhan investasi tersebut, maka mungkin tidak ada perubahan kemampuan pendidikan dan keterampilan industri dari masyarakat di negara Dunia Ketiga. Dependensi Baru masih melihat ada sisi positif dari sentuhan Kapitalisme yang terjadi di negara Dunia Ketiga, walaupun teori ini juga mengakui bahwa ketergantungan negara Dunia Ketiga terhadap negara maju adalah faktor terpenting dari keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga.

Namun seiring dengan ketergantungan tersebut, pembangunan yang berjalan di negara Dunia Ketiga juga tetap akan berjalan, walaupun dengan proses yang lebih lambat dari pembangunan yang pernah terjadi di negara maju. Berjalannya pembangunan inilah yang kemudian pada saatnya nanti akan mampu memutuskan rantai ketergantungan, sehingga negara Dunia Ketiga dapat menemukan bentuk dan

arahnya sendiri dalam melakukan pembangunan. Tentu saja jika hal ini telah terjadi, maka ketergantungan tersebut telah terurai dan lepas sama sekali.

Tabel 4.2.
Komparasi Dependensi Klasik dan Dependensi Baru

Elemen Perbandingan		Teori Dependensi Klasik	Teori Dependensi Baru
1		2	3
Persamaan	Fokus perhatian (keprihatinan)	Kemiskinan dan keterbelakangan negara Dunia Ketiga	Idem
	Konsep pokok	Sentral-pinggiran Ketergantungan	Idem
	Implikasi kebijakan	Ketergantungan bertolak belakang dengan pembangunan	Idem
	Level analisa	Nasional	Idem
Perbedaan	Metode	Abstrak: pola umum ketergantungan	Historis-struktural: situasi konkrit dari ketergantungan
	Faktor pokok	External factors: kolonialisme dan ketidakseimbangan nilai tukar	Internal factors: negara dan konflik kelas
	Ciri ketergantungan	Fenomena ekonomis	Fenomena sosial politik
	Pembangunan dan ketergantungan	Bertolak belakang; pembangunan hanya membawa keterbelakangan	Koeksistensi; pembangunan yang bergantung

4.5. Kesimpulan Teoritik

Kesimpulan teoritik dari teori Dependensi adalah:

- 1) Yang menjadi hambatan pembangunan bukan ketiadaan modal di negara Dunia Ketiga, namun terjadi karena sistem pembagian kerja internasional. Artinya ada faktor eksternal yang menghambat pembangunan di negara Dunia Ketiga, yaitu dominasi dan campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga.
- 2) Sistem pembagian kerja internasional antara negara pusat dan pinggiran menyebabkan negara pinggiran terhambat melakukan pembangunan ekonominya. Upah pekerja domestik negara Dunia Ketiga berada jauh dibawah upah pekerja asing yang bekerja di industri yang didirikan oleh investor asing di negara Dunia Ketiga. Perbedaan sistem pengupahan ini diiringi dengan ekspansi pasar barang-barang mewah dari negara maju ke negara Dunia Ketiga, sehingga antara pendapatan dan konsumsi warga negara Dunia Ketiga tidak berimbang.
- 3) Terjadi pengalihan surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara pusat, dalam arti bahwa negara pinggiran kehilangan sumberdaya utama dalam membangun negaranya. Dengan begitu maka kemajuan akibat pembangunan tidak akan dapat dicapai secara maksimal oleh negara pinggiran.

- 4) Untuk mengatasinya diperlukan pemutusan hubungan dengan Kapitalisme dan negara maju yang membawanya. Cara terbaik adalah melakukan revolusi politik secara langsung yang dilakukan oleh kelompok proletar (petani dan buruh desa) di negara Dunia Ketiga.

BAB 5

TEORI PEMBANGUNAN KONTEMPORER

5.1. Teori Artikulasi

Teori ini menyikapi kegagalan kapitalisme yang dilakukan di negara satelit, karena kapitalisme dapat berhasil dilakukan di negara maju. Minimal ada dua alasan utama yang menyebabkan kapitalisme gagal membawa negara berkembang untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan yang dilakukannya. Dua hal itu adalah kegagalan cara dan proses produksi di negara satelit.

1) Kegagalan proses produksi di negara satelit

Teori ini berpendapat bahwa negara satelit telah gagal memahami proses industrialisasi yang dicontohkan oleh negara maju. Pemahaman yang salah atas kapitalisme ini kemudian membawa kegagalan dalam mewujudkan kapitalisme dengan melakukan industrialisasi dalam negeri. Disinilah yang dimaksud dengan kegagalan dalam pembangunan menurut teori Artikulasi.

Negara Dunia Ketiga gagal mengartikulasikan profil kemajuan dan kemandirian ekonomi yang telah tercapai di negara maju dengan kapitalisasi ekonominya, sehingga kegagalan ini membawa negara satelit tetap menjadi negara miskin.

2) Kesalahan cara produksi

Industrialisasi yang berjalan di negara satelit mengalami kesalahan dalam hal produksi (*made of production*), sehingga pemanfaatan sumberdaya

alam tidak dilakukan secara maksimal untuk menghasilkan produk barang industri. Kesalahan cara produksi ini menyebabkan kapitalisme di negara satelit tidak berjalan dan berkembang secara murni, sehingga pembangunan tidak berhasil membawa kemajuan bagi negara tersebut.

Kegagalan cara produksi di negara Dunia Ketiga ini terjadi karena keterbatasan teknologi industri yang dikuasai oleh para tenaga ahli di negara Dunia Ketiga. Dengan terbatas dan sedikitnya teknologi industri yang dikuasai, maka produk industri yang dihasilkan oleh industri negara Dunia Ketiga tetap akan mengalami kekalahan dalam persaingan di pasar konsumsi dengan produk yang dihasilkan oleh industri negara maju.

Dengan tidak lakunya barang-barang produk industri negara Dunia Ketiga, maka pertumbuhan pendapatan industri-industri domestik akan cenderung rugi atau hanya mendapatkan laba yang minim, sehingga dengan keuntungan terbatas tersebut, karyawan dan para pekerja akan terbatas mendapatkan pendapatan dari kerja yang telah mereka lakukan. Jika pendapatan rendah, maka kemampuan konsumsi juga rendah. Maka negara Dunia Ketiga tetap masih berada dalam keterbelakangan jika tidak mampu merubah cara produksi industri yang ada didalam negaranya. Cara tercepat untuk merubahnya adalah dengan menguasai teknologi industri yang sangat menentukan mutu produk industri itu sendiri.

Tokoh teori ini adalah Claude Meillassoux dan Pierre Philippe Rey, keduanya adalah antropolog yang berasal dari Perancis.¹

5.2. Teori Sistem Dunia

Secara historis, program-program modernisasi pada tahun 1960-an di negara-negara Dunia Ketiga banyak mengalami kegagalan, sehingga mendorong munculnya teori Dependensi dengan aliran madzhab neo-Marxis yang mendasarinya. Teori Dependensi ini kemudian melakukan kritikan terhadap teori Modernisasi dan menuduhnya sebagai bentuk rasionalisasi dari imperialisme. Perdebatan antara dua kelompok teori ini menghangat pada tahun 1970-an. Pada saat inilah Immanuel Wallerstein menilai bahwa tata ekonomi kapitalis dunia tidak dapat dijelaskan hanya oleh dua perspektif teori yang telah mapan tersebut. Dalam hal ini Wallerstein mengajukan beberapa fakta yaitu:

1. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, Malaysia dan Singapura telah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa melakukan teori Modernisasi sebagaimana yang dipropagandakan oleh AS. Mereka juga tidak mengalami ketergantungan sebagaimana diusulkan oleh teori Dependensi. Ini merupakan tantangan serius bagi kekuatan ekonomi AS.

¹ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2000) h. 103-107

2. Adanya krisis di berbagai negara sosialis yang diawali dengan perpecahan di Republik Rakyat Cina dan runtuhnya Uni Soviet.
3. Fenomena krisis di Amerika Serikat akibat keterlibatannya dalam perang-perang di beberapa negara Dunia Ketiga, krisis Watergate, embargo minyak tahun 1975, inflasi dan stagnasi ekonomi Amerika Serikat akhir tahun 1970-an, adalah merupakan tanda mulai robohnya hegemoni ekonomi Amerika Serikat atas negara Dunia Ketiga.

Tiga hal pokok tersebut menjadi latar belakang historis kemunculan teori world empire yang diusulkan oleh Immanuel Wallerstein. Dengan menggunakan kerangka pemikiran neo-Marxis, ia dan beberapa sosiologi lainnya melakukan kajian terhadap pembangunan di negara Dunia Ketiga dengan perpektif yang berbeda dengan teori Modernisasi dan Dependensi.

Asumsi dasar dari teori ini menyatakan bahwa dunia awalnya dikuasai oleh kekuatan lokal dengan sistemnya masing-masing, lalu kekuatan ini saling menjalin hubungan walaupun terpisahkan lokalitasnya. Kemudian terjadi penggabungan sistem baik oleh penaklukan atau penyerahan sukarela. Sebuah Kerajaan Dunia (*World Empire*) kemudian muncul dan mengendalikan sistem ekonomi-politik dari sistem-sistem negara dibawahnya secara terpusat, walaupun tidak secara yuridis. *World Empire* inilah yang sekarang mengendalikan negara-negara di dunia.

Dengan tinjauan teoritik tersebut, muncul tiga klasifikasi negara dan fungsi ekonominya antara satu dengan lainnya, tiga klasifikasi tersebut adalah:

1. *Negara Pusat*, mengambil keuntungan dari:

2. *Negara Pusat-Pinggiran*, mengambil keuntungan dari:

3. *Negara Pinggiran*, pihak yang paling dieksploitir.

Wallerstein tidak sepakat dengan pendekatan Dependensi yang melihat bahwa dalam ketergantungan yang terjadi, hanya ada dua jenis negara yaitu negara pusat dan negara pinggiran. Dalam kata lain ada negara metro dan ada juga negara satelit. Ketidaksepakatan ini berangkat dari anggapan bahwa dunia, negara dan pembangunan yang sedang dan akan terjadi ini tidak begitu kompleks. Tidak sesederhana seperti yang dijelaskan oleh teori Dependensi dengan penggolongan tersebut. Untuk itulah kemudian ia mengusulkan adanya tiga klasifikasi negara yang kini sedang muncul di dunia.

Lebih lanjut, tiap negara dilihat dalam bingkai sistem dunia secara utuh dan tidak dapat berdiri sendiri. Tiap negara dalam kasta tersebut naik status menuju negara dengan tingkat kemakmuran lebih baik. Menurut Immanuel Wallerstein, ada tiga strategi bagi sebuah negara untuk dapat menaikkan kastanya dalam konsep *world empire*, yaitu:

- 1) Berani merebut kesempatan untuk berspekulasi melakukan industrialisasi substitusi barang impor oleh negara pinggiran. Ketika hal ini berani dilakukan oleh negara pinggiran, maka ia akan dapat menyiapkan ancang-ancang untuk tidak tergantung oleh negara pusat dalam hal pasokan barang-barang baku industri di dalam negerinya sendiri;
- 2) Menarik investasi perusahaan luar negeri untuk mendirikan perusahaan multinasional dan menggandeng pengusaha lokal. Dalam hal ini, peran

negara menjadi sangat vital karena institusi yang bernama negara yang mampu melakukan koordinasi dan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil domestik yang pada umumnya memiliki modal, tenaga ahli dan wilayah pemasaran produksi terbatas. Jenis industri domestik dalam skala internasional jelas memerlukan dana yang tidak sedikit karena ia akan bersaing dengan produk unggulan negara-negara maju yang sudah memiliki pangsa pasar jelas dengan kualitas yang telah teruji. Yang dapat mengawal hal ini adalah negara yang menjadi institusi politik tertinggi dalam sebuah kawasan;

- 3) Negara menjalankan kebijakan internal untuk memandirikan perekonomian negaranya sendiri dan terbebas dari dominasi negara pusat. Salah satu kebijakan internal tersebut dapat berupa politik dumping atau proteksi atas produk-produk industri dalam negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. Proteksi ini juga menuntut perlindungan dari sisi kebijakan ekonomi yang merupakan otoritas pemerintah negara pinggiran dan pasokan modal yang juga harus diperbantukan untuk mampu meningkatkan industri tersebut menjadi usaha yang lebih besar dan mampu bersaing dengan industri luar negeri lainnya. Selain itu, pemerintahan negara pinggiran juga harus mulai menyiapkan tenaga ahli dalam negeri untuk pada saatnya nanti mereka dapat mengembangkan teknologi industri domestik. Dengan peningkatan penguasaan teknologi industri domestik, maka produk industri dalam negeri akan dapat bersaing

ditengah pasar global yang sedang berjalan. Dengan survive-nya industri domestik, maka pendapatan nasional sebuah negara akan berpotensi mengalami surplus pertumbuhan ekonomi. Surplus pertumbuhan ekonomi dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan oleh tiap proses pembangunan.²

Tabel 5.1.
Komparasi teori Dependensi dan teori World Empire

Elemen Perbandingan	Teori Dependensi	Teori World Empire
1	2	4
Metode kajian	Historis-struktural: masa jaya dan surut negara-bangsa	Dinamika sejarah sistem dunia: kecenderungan sekuler dan irama perputaran (siklus)
Unit analisa	Negara-bangsa	Sistem dunia
Arah pembangunan	Deterministik: Ketergantungan selalu merugikan	Kemungkinan mobilitas naik dan turun dalam tiga kasta negara
Struktur teori	Dua jenis negara: Negara pusat Negara pinggiran	Tiga jenis negara: Negara pusat Negara pusat-pinggiran (semi pusat) Negara pinggiran
Lokus kajian	Negara pinggiran	Negara pusat Negara semi pinggiran/pusat

² Immanuel Wallerstein, “*Dependence in an Interdependent World: The Limited Possibilities of Transformation Within The Capitalist World Economy*” makalah yang dipresentasikan dalam Conference on Dependence and Development in Africa, Ottawa, Canada, Pebruari 16-18, 1973. h. 7-12

		Negara pinggiran Sistem ekonomi dunia
--	--	--

BAB 6

PENUTUP

6.1. Peta Teoritik

No	Teori	Tokoh	Asumsi
1	2	3	4
01	Modernisasi	Evsey Domar Roy Harrod Max Weber David McClelland WW. Rostow	Dua indikator pembangunan: investasi dan tabungan. Jika keduanya mengalami peningkatan dalam sebuah negara, maka pembangunan dikatakan berhasil, jika sebaliknya, maka pembangunan gagal. Terdapat korelasi positif antara antara etika Protestan dengan kemajuan Kapitalisme di Eropa. Kajian ini melahirkan asumsi bahwa agama dapat berkorelasi dengan pembangunan Unsur <i>asketisme</i> dan <i>calvinisme</i> dalam etika Protestan di Eropa Keberhasilan pembangunan bukan ditentukan dari lembaga dan ideologinya, namun ditentukan dari motivasi pencapaian prestasi tinggi (<i>need for achievement/ n-ach</i>) dari warga negara tersebut. Semakin tinggi nilai <i>n-ach</i> warga sebuah negara, maka semakin terbuka kemungkinan keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, jika nilai <i>n-ach</i> rendah, maka pembangunan terancam gagal. Pembangunan adalah proses linier yang memerlukan perencanaan matang terhadapnya, bukan proses <i>zig-zag</i> atau gradual.

		Bert F. Hozelitz Alex Inkeles David H. Smith	Indikator keberhasilan pembangunan adalah kemandirian ekonomi. Ada lima tahapan pembangunan yang harus ditempuh secara linier oleh sebuah negara untuk mencapai kemajuan. Kegagalan pembangunan adalah kegagalan melewati lima tahapan tersebut. Pembangunan bukan persoalan investasi semata, namun juga terkait dengan kesiapan institusi ekonomi sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi. Peran besar dari tenaga ahli dalam pembangunan. Pendidikan adalah upaya paling efektif untuk melakukan perubahan dalam pembangunan. Hal tersebut karena pendidikan membawa efek lebih kuat dibanding upaya lainnya. Pendidikan dan pengalaman kerja, menjadikan manusia lebih modern.
02	Teori Struktural	Raul Presbich Paul Baran John A. Hobson	Hambatan utama dari industrialisasi datang dari luar (<i>external factors</i>) negara, bukan dari dalam (<i>internal factors</i>) negara tersebut. Hambatan tersebut berbentuk sistem perdagangan bebas dalam skala internasional. Kapitalisasi yang terjadi di negara berkembang, berbeda dengan kapitalisasi yang terjadi di negara maju. Justru karena kapitalisasi itulah, negara berkembang tidak akan menjadi maju. Teori Gold Imperialisasi terjadi karena upaya menguasai emas

		Joseph A. Schumpeter	Teori Glory Imperialisasi terjadi karena upaya memperluas kedaulatan negara
		Robin W. Winks	Teori God Imperialisasi terjadi sebagai upaya penyebaran agama
03	Teori Dependensi	Theotonio Dos Santos	Ketergantungan adalah kondisi dimana ekonomi sebuah negara dipengaruhi oleh ekspansi ekonomi negara lain. Tiga bentuk ketergantungan: • Ketergantungan kolonial • Ketergantungan finansial-industrial • Ketergantungan teknologis-industrial
		Andre Gunder Frank	Kapitalisme menyebabkan keterbelakangan di negara Dunia Ketiga Tiga komponen penyebab gagalnya pembangunan di negara miskin: • Modal asing • Pemerintah lokal di negara Dunia Ketiga • Kaum borjuis di negara Dunia Ketiga
04	Teori Artikulasi	Claude Meillassoux dan Pierre Philippe Rey	Kegagalan pembangunan di negara Dunia Ketiga karena kesalahan dalam mengartikulasikan kapitalisme dari negara maju. <i>Fallacy for made of production</i> di negara berkembang, menyebabkan kegagalan pembangunan.
05	Teori World Empire	Immanuel Wallerstein	Terbentuk kerajaan dunia (<i>world empire</i>) dari kekuatan lokal di masing-masing daerah yang mengendalikan sistem ekonomi-politik negara yang berada dibawahnya. Tiga klasifikasi negara:

			• Negara pusat • Negara pusat-pinggiran • Negara pinggiran
--	--	--	--

6.2. Kesimpulan

1. Pembangunan merupakan sebuah term yang *interpretable* dan memerlukan pendekatan dari beberapa pengetahuan yang multidisipliner.
2. Masing-masing teori pembangunan, lahir atas adanya upaya untuk memberikan kritikan kepada teori lain.
3. Dua faktor utama dari keterbelakangan, yaitu *internal factors* dan *external factors*. *Internal factors* adalah dasar asumsi dari teori modernisasi, sedangkan *external factors* adalah dasar asumsi dari teori dependensi dan teori-teori lain.

Daftar Pustaka

- Amin. Samir, dalam Magnus Blomstrom & Bjorn Hettne, *Development Theory in Transition, The Dependency Debat and Beyond: Third World Responses*, (London: Zed Books, 1984)
- Blomstrom. Magnus & Bjorn Hettne, *Development Theory in Transition, The Dependency Debat and Beyond: Third World Responses*, (London: Zed Books, 1984)
- Brewer. Anthony, *Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1980)
- Budiman. Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2000)
- Dos Santos. Theotonio, "The Structure of Dependence" dalam *American Economic Review*, Vol. 60, May.
- Fakih. Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002)
- Gill. Stephen, Neo-Liberalism and The Shift Toward a US-Centered Transnational Hegemony, in Henk Overbeek, ed., *Restructuring Hegemony in The Global Political Economy: The Rise to Transnational Liberalism in The 1980s*, (London: Routledge, 1993)
- Hozelitz. Bert F., *Economic Growth and Development: Non-Economic Factors in Economic Development*, dalam Finkle & Gable, ed., 1971
- Inkeles. Alex & David H. Smith, *Becoming Modern: In Individual Change in Six Developing Countries*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971)
- McClelland. David C., *The Achievement Motive in Economic Growth* dalam Finkel & Gable, ed, 1971
- Ritzer. George, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
- Rostow. W.W., *The Stages of Economics Growth: A Non-Communist Manifesto*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1966)

- Roxborough. Ian, *Theories of Underdevelopment*, (London: Macmillan Press Ltd, 1979)
- Sugiono. Muhadi, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Tjokrowinoto. Moeljarto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Wallerstein. Immanuel, “*Dependence in an Interdependent World: The Limited Possibilities of Transformation Within The Capitalist World Economy*” makalah yang dipresentasikan dalam Conference on Dependence and Development in Africa, Ottawa, Canada, Pebruari 16-18, 1973.
- Weber. Max, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, (New York: Charles Scribner’s Sons, 1958)
- Winks. Robin W., ed., *British Imperialism: God, God, Glory*, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1963)